



**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) CIBODAS DESA  
CIBODAS KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI  
(2019)**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Riki Adi Saputra  
0221 16 057

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**DESEMBER 2020**

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) CIBODAS DESA  
CIBODAS KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI  
(2019)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi Akuntansi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

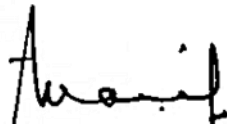
**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) CIBODAS DESA  
CIBODAS KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN SUKABUMI  
(2019)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020

Riki Adi Saputra  
0221 16 057

Menyetujui  
Ketua Penguji Sidang,



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CA., CPA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Haqi Fadillah, S.E., M.Ak.)

**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER  
INFORMASI SERTA PELIMPAHAN KEKAYAAN  
INTELEKTUAL DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS  
PAKUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Adi Saputra  
NPM : 022116057  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi (2019)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari Komisi Pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Desember 2020

Riki Adi Saputra  
022116057

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, tahun 2020**  
**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

Riki Adi Saputra. 022116057. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi (2019). Pembimbing: Chandra Pribadi Dan Haqi Fadillah. 2020.

BUMDes harus membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan serta mudah dipahami, karena laporan keuangan tersebut akan di pertanggungjawabkan ke berbagai pihak termasuk ke pemerintahan. SAK ETAP ditujukan serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia berskala kecil dan menengah. SAK ETAP diharapkan membuat perusahaan kecil menengah mampu untuk menyusun laporan keuangan mereka sendiri, dapat di audit dan mendapat opini audit serta dapat menggunakan laporan keuangan mereka untuk memperoleh dana untuk pengembangan usaha. Itu berarti SAK ETAP ini tepat digunakan untuk BUMDes karena mereka menggunakan dana pemerintah dan masyarakat sebagai modal usahanya, sehingga butuh laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk di pertanggungjawabkan ke berbagai pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis penyusunan dan penerapan SAK ETAP pada neraca dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas. (2) Untuk menganalisis penyusunan dan penerapan SAK ETAP pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas. (3) Untuk menganalisis penyusunan dan penerapan SAK ETAP pada laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas.

Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Cibodas yang berada di Desa Cibodas. jenis data yang diteliti adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa pencatatan atas berbagai transaksi yang dilakukan pada BUMDes Cibodas belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Cibodas hanya menyajikan laporan keuangan hanya 1 jenis yaitu laporan laba rugi, sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan SAK ETAP

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi (2019)”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya yang semuanya itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar menjadi lebih baik.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, perkenankan penulis untuk menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ibu Juarsih dan Bapak Subandi yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga dalam penyusunan skripsi berjalan dengan lancar.
2. Suherman, Windi dan Risna Wati selaku kakak dari penulis yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Pakuan.

4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CA., CPA. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Haqi Fadillah, SE., M.Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Siti Maimunah, SE., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan juga saran yang membangun bagi penulis.
8. Para Struktural, Dosen, dan Staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor khususnya Ibu Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si. , Bapak Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak., Bapak Abdul Kohar, Bapak Amri, dan Bapak Uwo.
8. Terimakasih Kepada Sahabat Rizal Irwansyah dan Jayani yang selalu menemani dan terus mendampingi dari dulu sampai sekarang.
9. Temen-temen Kosan sekaligus teman seperjuangan yang luar biasa (Sukma, Reza Gc, Isan, Tio, Anasin, Lana, Shamsudin, Yuda, Putraman, Arkan, Wahab, Deni, Aldo, Kevin, Nursyan, Malik dan masih banyak yang lainnya).
10. Teman-teman kelas A dan B Akuntansi 2016 terimakasih untuk 8 semesternya, karena telah memberikan warna dan pengalaman berharga dalam hidup penulis.

Bogor, Desember 2020  
Penulis,

Riki Adi Saputra



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR HAK CIPTA.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Akademis .....	7
1.4.2 Kegunaan Praktik .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Laporan Keuangan .....	8
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan .....	8
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan .....	9
2.1.3 Kegunaan Laporan Keuangan .....	9
2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.....	10
2.2.1 Pengertian SAK ETAP.....	10
2.2.2 Ruang Lingkup SAK ETAP .....	10
2.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP.....	12
2.2.4 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP .....	14
2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	18
2.3.1 Pengertian BUMDes .....	18
2.3.2 Tujuan BUMDes .....	19
2.3.3 Jenis Usaha BUMDes .....	19
2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	21
2.4.1 Penelitian Sebelumnya .....	21
2.4.2 Kerangka Pemikiran.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	34
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	34
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data .....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum BUMDes.....	37
4.1.1 Profil BUMDes Cibodas .....	37
4.1.2 Visi Misi dan Dasar Hukum BUMDes.....	38
4.1.3 Pelaksanaan Pengelolaan, Permasalahan Dan Program Kerja ..	38
4.1.4 Arah Kebijakan Yang Telah Ditempuh BUMDes Cibodas .....	40
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	4
4.2.1 Pencatatan Laporan Keuangan BUMDes .....	40
4.2.2 Siklus Akuntansi.....	41
4.2.3 Neraca.....	51
4.2.4 Laporan Laba Rugi.....	57
4.2.5 Laporan Perubahan Ekuitas.....	61
4.2.6 Laporan Arus Kas.....	62
4.2.7 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	63
4.2.8 Kendala yang Dihadapi BUMDes Cibodas .....	65
4.2.9 Pemakai/Pengguna Laporan Keuangan BUMDes .....	65

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....**

### **LAMPIRAN.....**

## **DAFTAR TABEL**

2.1	Penelitian Terdahulu.....	21
3.1	Operasionalisasi Variabel .....	34
4.1	Contoh Pencatatan Transaksi.....	44
4.2	Jurnal Umum .....	45
4.3	Buku Besar .....	46
4.4	Neraca Saldo.....	48
4.5	Jurnal Penyesuaian .....	49
4.6	Neraca Lajur .....	50
4.7	Perbandingan Pengakuan .....	53
4.8	Perbandingan Pengukuran .....	55
4.9	Neraca.....	57
4.10	Perbandingan Pengakuan.....	58
4.11	Perbandingan Pengukuran .....	59
4.12	Laporan Laba Rugi .....	54
4.13	Laporan Perubahan Ekuitas .....	55
4.14	Laporan Arus Kas .....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

1.1 Laporan Laba Rugi BUMDes Cibodas .....	5
2.1 Kerangka Pemikiran .....	32
4.1 Laporan Laba Rugi.....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Catatan transaksi dan aktivitas BUMDes Cibodas .....	76
Lampiran 2 : Laporan Laba Rugi BUMDes Cibodas yang disusun pengurus .....	87

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Indonesia melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Antasari, 2016). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Salah satu bentuk terlaksananya BUMDes yang baik dapat dilihat dari penerapan prinsip akuntansi yang tepat dan benar. BUMDES merupakan suatu lembaga yang didasari oleh landasan hukum. Oleh karena itu, penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan harus berlandaskan standar keuangan, sehingga menjadi acuan yang kuat dalam kepercayaan dan keterbukaan atas keuangan yang dikelola BUMDes dari semua pihak.

BUMDes harus membuat laporan keuangan yang akuntabel dan transparan serta mudah dipahami, karena laporan keuangan tersebut akan dipertanggungjawabkan ke berbagai pihak termasuk pemerintahan. BUMDes harus membuat laporan keuangan dengan wajar karena merupakan institusi usaha yang menggunakan dana pemerintah dan masyarakat sebagai modal usahanya. Laporan keuangan yang berpedoman kepada standar akuntansi keuangan dan peraturan yang berlaku inilah yang menjadi tolok ukur bagi pihak yang menjadi pengawas BUMDes tersebut. Pelaporan keuangan yang tidak jelas dan tidak sesuai dapat berisiko karena dianggap sebagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada masalah hukum yang nantinya harus dipertanggungjawabkan.

Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Menurut anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi, menyatakan bahwa kondisi BUMDes belum merata dan jauh dari kondisi ideal, bahkan ada beberapa catatan tentang BUMDes di Kabupaten Sukabumi yang dianggap masih lemah terutama soal Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu pentingnya akuntansi untuk membaca alur kas keuangan. Selain itu juga masih banyak BUMDes yang mangkrak di Kabupaten Sukabumi yaitu sekitar 381 BUMDes, dan itu terbilang cukup banyak. Dari banyaknya BUMDes yang masih berdiri, yang dikategorikan BUMDes maju sekitar 10 persen hingga 50 persen dan sisanya belum maju (Oksa B, 2019).

Desa Cibodas merupakan desa yang masyarakatnya mayoritas sebagai petani, tetapi tidak sedikit juga banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai pedagang, baik pedagang kaki lima maupun pedangan kelontongan. Dari masalah itulah pengurus BUMDes Cibodas melihat Peluang yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan untuk usaha BUMDes yang akan mereka dirikan. Dimana nantinya dengan didirikan BUMDes bisa membantu masyarakat memperoleh barang dagangan dari BUMDes Cibodas yang jaraknya tidak jauh dari tempat usaha mereka, daripada dengan membeli barang dagangan dari desa lain yang jaraknya cukup jauh.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebar diseluruh Desa di Indonesia. Salah satunya BUMDes yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu BUMDes Cibodas, BUMDes ini merupakan satu-satunya BUMDes yang ada di Desa Cibodas, karena kurangnya pengelolaan dan pengetahuan masyarakat tentang BUMDes itu sendiri, jadi Pemerintah Desa bisa fokus untuk membangun dan mengembangkan BUMDes tersebut. BUMDes ini terletak di Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi. BUMDes ini didirikan Pada tanggal 1 Januari 2019, dengan didirikannya BUMDes Cibodas tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi

dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Cibodas, karena bukan lagi program *topdown* atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

Pada awal berdiri BUMDes Cibodas tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha melainkan menggali beberapa potensi yang berada di Desa Cibodas. Penggalan potensi ini memakan waktu kurang lebih satu bulan, dikarenakan letak geografis wilayah desa cibodas yang terdiri dari tiga kedesunan dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta sebagian besar juga merantau ke kota-kota besar. Penggalan potensi ini dilakukan antara bulan pertengahan bulan Januari 2019. Setelah didapat beberapa data, kemudian dibuatlah peta konsep dimasing-masing tempat yang tentunya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai pendukung kegiatan dalam menentukan unit usaha.

BUMDes Cibodas Ini bergerak dibidang perdagangan, dimana BUMDes ini menjual beberapa kebutuhan masyarakat yaitu toko kelontongan, dan BUMDes ini juga bertindak sebagai grosir bagi toko kecil yang membutuhkan barang dagangan, BUMDes ini pun menampung makanan ringan dan minuman hasil olahan masyarakat setempat. Untuk mempermudah permodalan dan penyediaan barang, BUMDes ini bekerja Sama dengan Persatuan Perdagangan Indonesia (PPI). BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangannya yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan laporan keuangannya maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP.

Namun, dalam menetapkan kebijakan, pelaksanaan, dan pengelolaan BUMDes. masih banyak dijumpai masalah yang dihadapi BUMDes antara lain, terkait dengan aspek manajemen, standar akuntansi keuangan, dan legalitas hukum. Terkait dengan persoalan keuangan, Standar Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya, SAK ETAP lebih cocok diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Karena selain lebih *fleksible*, dari beberapa aspek juga terlihat lebih ringan dan mudah dipergunakan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose finansial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan peneringkat kredit.

SAK ETAP ditujukan serta diterapkan bagi sebagian besar entitas usaha di Indonesia berskala kecil dan menengah. SAK ETAP diharapkan membuat perusahaan kecil menengah mampu untuk menyusun laporan keuangan mereka



sendiri, dapat diaudit dan mendapat opini audit serta dapat menggunakan laporan keuangan mereka untuk memperoleh dana untuk pengembangan usaha. Itu berarti SAK ETAP ini tepat digunakan untuk BUMDes karena mereka menggunakan dana pemerintah dan masyarakat sebagai modal usahanya, sehingga butuh laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku untuk dipertanggungjawabkan ke berbagai pihak termasuk Pemerintah atas uang yang dikelola oleh BUMDes. Laporan keuangan SAK ETAP ini menjadi isu sebagai prasyarat BUMDes menjadi badan hukum publik bercirikan desa, serta kaitan dengan pemeriksaan oleh inspektorat dan BPK terkait dengan dana desa sebagai penyertaan modal dan juga sebagai bentuk transparansi dengan penyampaian melalui musyawarah desa dibantu dengan media lainnya.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan SAK ETAP untuk memberikan kemudahan bagi suatu entitas yang tidak mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan tidak banyak melakukan kegiatan lintas negara, sehingga untuk ukuran bisnis BUMDes ini relevan menggunakan SAK ETAP (Nurhayati dan Afriyant0, 2016). SAK ETAP diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2011 tetapi penerapan diperbolehkan pada 1 Januari 2010, dengan adanya standar ini dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. salah satu indikator yang dilaksanakan sebagai penerapan prinsip akuntansi yang tepat pada BUMDes adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara tepat dan benar. Menurut (Rudini dan Nurhayati, 2011) Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), menyatakan laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi, Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan masih banyak BUMDes yang sudah berkembang di Indonesia yang belum menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya karena dari beberapa masih memiliki anggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Kenyataannya pengelolaan keuangan pada beberapa BUMDes yang sudah berkembang terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan masih belum ada ketetapan yang mengharuskan mengacu pada SAK ETAP.

Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan pada BUMDes Cibodas hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas yang terjadi serta langsung membuat Laporan Laba Rugi yang belum cukup detail, belum cukup detail disini seperti pemasukan itu tidak dijelaskan apakah hasil dari penjualan tunai atau dari pembayaran piutang dan pengeluaran pun tidak dijelaskan pengeluaran untuk keperluan apa dan beban apa aja yang menambah akun pengeluaran tersebut,

sehingga di laporan laba ruginya tidak ada akun-akun yang seharusnya dicatat di laporan laba rugi, seperti beban sewa, beban penyusutan, dan beban perlengkapan. Sehingga pengurus BUMDes hanya melaporkan laporan laba rugi dan catatan-catatan transaksi toko yang telah terjadi kepada kepala Desa sebagai laporan pertanggungjawaban atas kinerja BUMDes tersebut selama satu tahun berjalan. Dalam hal ini belum sesuai dengan standar yang harus diterapkan yaitu berpedoman pada SAK ETAP. Ini karena BUMDes memiliki kendala yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman pihak pengelola BUMDes mengenai pedoman dan peraturan yang berlaku, sehingga pelaporan yang dilakukan hanya dalam bentuk pencatatan sederhana saja. BUMDes seharusnya dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman sehingga dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kinerja entitas dalam suatu periode tertentu, dan menjadi sumber acuan dalam pengambilan keputusan serta informasi bagi pihak eksternal.

Ini merupakan laporan keuangan BUMDes Cibodas yang hanya membuat laporan laba rugi sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa dan Kecamatan.

Laporan Laba Rugi BUMDes Cibodas		
Pendapatan		xx
Pengeluaran	x	
Belanja	x	
Beban Listrik	x	
Beban Upah	x	xx
Laba Usaha		x

Gambar 1.1

#### Laporan Laba Rugi BUMDes Cibodas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, Masyhad, dan Qomari (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan SAK ETAP Pada BUMDes “Surya Sejahtera” di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan atas berbagai transaksi yang dilakukan penggolongan transaksi pada BUMDes “Surya Sejahtera” belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes “Surya Sejahtera” menyajikan laporan keuangan hanya tiga jenis yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Dan Kas. Sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan CALK.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudini, Nurhayati, dan Afriyanto (2015) dalam penelitiannya mengenai Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin di Desa Langkitin menghasilkan simpulan bahwa pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan penggolongan transaksi pada BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDES Langkitin menggunakan Jurnal Memorial untuk peringkasan dan Neraca Percobaan untuk

pengikhtisaran sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menyajikan Laporan Keuangan hanya dalam dua jenis yaitu Neraca, Dan Laporan Laba Rugi, sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Dan CALK.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BUMDes Cibodas dengan judul “**Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ‘Cibodas’ di Desa Cibodas Kecamatan Cibitung**”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

BUMDes Cibodas dalam menyusun laporan keuangannya hanya sebatas laporan yang sajikan untuk diberikan kepada Kepala Desa, sehingga BUMDes ini tidak membuat laporan keuangannya secara rinci baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran dalam menjalankan usaha BUMDesnya, dengan hal ini maka BUMDes Cibodas dalam menyusun laporan keuangannya belum sesuai berdasarkan dengan SAK ETAP, hal ini akan menimbulkan masalah ketika dana BUMDes yang dikelola dari kegiatannya apa adanya tanpa melalui proses pencatatan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam identifikasi masalah ini maka penulis tertarik untuk menganalisis penerapan SAK ETAP laporan keuangan pada BUMDes Cibodas.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan dan penerapan SAK ETAP pada neraca dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas ?
2. Bagaimana penyusunan dan penerapan SAK ETAP pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas ?
3. Bagaimana penyusunan dan penerapan SAK ETAP pada laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana penerapan SAK ETAP pada neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas, dalam laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyusunan dan penerapan SAK ETAP pada neraca dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas
2. Untuk menganalisis penyusunan dan penerapan SAK ETAP pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas
3. Untuk menganalisis penyusunan dan penerapan SAK ETAP pada laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penelitian ini memberi manfaat kepada pengurus BUMDes ataupun yang bekerja di BUMDes berupa pengetahuan tentang bagaimana menerapkan standar laporan keuangan yang telah ditetapkan (SAK ETAP) dalam menyusun laporan keuangan sehingga tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa laporan keuangan untuk mendorong BUMDes yang lebih baik.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademisi**

Bagi penulis penelitian ini sebagai pengimplementasian ilmu yang didapat di perkuliahan dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Sedangkan bagi pembaca penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan teori pembelajaran maupun pengetahuan dibidang akuntansi tentang bagaimana menganalisis laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2014). Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Hery (2018) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Setiap perusahaan go publik harus memiliki laporan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan. Informasi dari laporan keuangan berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan. Informasi dari laporan keuangan juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan memprediksi keadaan ekonomi pada perusahaan tersebut. Laporan keuangan di Indonesia dapat berupa laporan triwulan, semesteran maupun laporan tahunan. Laporan keuangan tahunan berisikan laporan keuangan yang diaudit, diskusi dan analisis dari pihak manajemen, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan (Murhadi, 2015).

Demikian juga halnya, menurut keputusan BAPEPAM dan lembaga keuangan Nomor Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik, bahwa laporan keuangan dalam peraturan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam SAK dan terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan; dan
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan saat emiten atau perusahaan publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika emiten atau perusahaan publik mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2018) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Hery (2018) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

### **2.1.3 Kegunaan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan sangat dibutuhkan bagi para pemilik kepentingan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (2018) kegunaan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Informasi laporan keuangan berguna untuk menilai prospek arus kas masuk neto masa depan kepada suatu entitas.
2. Informasi mengenai pertanggungjawaban manajemen berguna untuk pengambilan keputusan oleh investor saat ini, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya yang memiliki hak suara atau pengaruh atas tindakan manajemen.

Samryn (2015) menyatakan bahwa kegunaan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan investasi atau keputusan kredit tanpa harus membuat lebih dari satu laporan keuangan untuk satu periode akuntansi.
2. Informasi yang dijelaskan dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai potensi arus kas dimasa yang akan datang.
3. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menjelaskan kekayaan perusahaan, kepemilikan dan/atau pihak-pihak yang masih berhak atas sumber daya tersebut.
4. Informasi yang disajikan juga dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi atas sumber daya tersebut selama satu periode akuntansi yang dilaporkan.
5. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur prestasi manajemen dengan selisih antara pendapatan dan beban dalam periode akuntansi yang sama.
6. Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek, jangka panjang, dan arus dana.

## **2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

### **2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) dalam SAK ETAP, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan pemingkat kredit.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018), SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

### **2.2.2 Ruang Lingkup SAK ETAP**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) dalam SAK ETAP, SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dua kriteria yang

menentukan apakah suatu entitas tergolong Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu :

1. Tidak Memiliki Akuntabilitas Publik Yang Signifiikan

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika :

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi Lembaga Pasar Modal, Termasuk Emiten, Perusahaan Publik, Manajer Investasi, Sekuritas, Asuransi, Reksa Dana, dan Kontrak Investasi Kolektif.
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (General Purpose Financial Statement) bagi pengguna eksternal.

Contoh pengguna eksternal adalah :

- a. Pemilik Yang Tidak Terlibat Langsung Dalam Pengelolaan Usaha
- b. Kreditur; dan
- c. Lembaga Pemeringkat Kredit

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Mengingat kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka terdapat beberapa ketentuan transisi dalam SAK ETAP yang cukup ketat:

1. Pada bab 29 misalnya disebutkan bahwa pada awal tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 Januari 2011 entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.
2. Per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK ETAP.
3. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011, namun kemudian



mendaftar menjadi perusahaan publik ditahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali.

4. Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.

### **2.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP**

#### **1. Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 Konsep dan Prinsip Pervasif. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

#### **2. Kepatuhan terhadap SAK ETAP**

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

#### **3. Kelangsungan Usaha**

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus

diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

#### 4. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan pelaporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut
- b. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek,
- c. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya dapat diperbandingkan.

#### 5. Penyajian yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK ETAP bab 9 tentang kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan; atau
- b. SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- a. Sifat reklasifikasi;
- b. Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan
- c. Alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan :

- a. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan
- b. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

#### 6. Informasi Komparatif

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan

keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

#### 7. Materialitas dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

#### 2.2.4 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

Laporan Keuangan Lengkap Laporan keuangan entitas menurut SAK ETAP meliputi:

##### 1. Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Piutang usaha dan piutang lainnya;
- c. Persediaan;
- d. Properti investasi;
- e. Aset tetap;
- f. Aset tidak berwujud;
- g. Utang usaha dan utang lainnya;
- h. Aset dan kewajiban pajak;
- i. Kewajiban diestimasi;

##### 2. Laporan Laba Rugi;

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;
- d. Beban pajak;

e. Laba atau rugi neto.

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

#### 1) Laporan Perubahan Ekuitas

Tujuan laporan ekuitas yaitu menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode;
- b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;
- d. untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
  - i. Laba atau rugi;
  - ii. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
  - iii. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

#### 2) Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 Laporan Laba Rugi SAK ETAP :

- a. Saldo laba pada awal periode pelaporan;
- b. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode;

- c. Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu;
- d. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.

#### 4. Laporan Arus Kas

Menurut SAK ETAP (2018) laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut:

##### 1) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah :

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
- b. Penerimaan kas dari royalty, *fees*, komisi, dan pendapatan lain;
- c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
- d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;
- e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
- f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

##### 2) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah :

- a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
- c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture* (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);

- d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari *joint venture* (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);
- e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;
- f. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;

### 3) Aktivitas Pendanaan

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah :

- a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;
- b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;
- c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;
- d. Pelunasan pinjaman;
- e. Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

### 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (SAK ETAP, 2016). Catatan atas laporan keuangan harus:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6;
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3);

- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5);
- c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- d. Pengungkapan lain.

## **2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan :

- a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa
- b. Potensi usaha ekonomi desa
- c. Sumber daya alam di desa
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes
- e. Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes

Struktur BUMDes terdiri dari pemilik, penasehat, pengawas, serta pengelola.

Pemilik merupakan Pemerintah Desa dengan kepemilikan 100% atau minimal 60% dimana 40% sisanya bisa dimiliki warga desa. Penasehat merupakan Kepala Desa. Pengawas merupakan unsur BPD, unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan pengelola terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha.

#### ➤ Ciri-Ciri BUMDes

Menurut pusat Kajian dinamika sistem pembangunan (2007) ciri-ciri dari BUMDes antara lain :

- a. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama Masyarakat desa
- b. Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49% dilakukan dengan cara penyertaan modal (saham atau andil)

- c. Menggambarkan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini dikontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota Masyarakat
- d. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa
- f. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

### **2.3.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa. Pendirian BUMDes bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

### **2.3.3 Jenis Usaha BUMDes**

Berikut beberapa jenis usaha BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 antara lain :

- a. Serving

Serving adalah salah satu jenis BUMDes yang fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, atau bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu fokus pada pencarian keuntungan. Contohnya antara lain lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.



b. Banking

Jenis BUMDes ini berfokus pada bisnis keuangan, yakni dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa, berbeda dengan bank lainnya, pada usaha desa ini memberikan bunga yang lebih rendah karena memang berorientasi untuk membantu dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, bank desa, lembaga keuangan mikro desa dan lainnya.

c. Renting

Renting merupakan jenis usaha badan desa yang berfokus pada bidang penyewaan, yakni dengan melayani semua masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan lainnya. Contohnya persewaan traktor, rumah, toko, tanah, gedung dan lain sebagainya.

d. Trading

Trading merupakan salah satu jenis usaha di BUMDes yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan lainnya.

e. Holding

Holding merupakan salah satu jenis badan usaha yang sering disebut dengan usaha bersama. Unit bersama disini adalah sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri, yang diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya desa wisata yang mengkoordinir berbagai jenis usaha kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan dan lainnya.

f. Contracting

Contracting adalah usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh unit usaha dalam BUMDes bekerjasama dengan Pemerintah Desa atau pihak lainnya. Contohnya seperti pembangunan sarpras seperti aspal jalan dan lain sebagainya.

## 2.4 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.4.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1.	Jayanti dan Qomari (2018)	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Surya Sejahtera” Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan atas berbagai transaksi yang dilakukan penggolongan transaksi pada BUMDesa “Surya Sejahtera” belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDesa “Surya Sejahtera” menyajikan laporan keuangan hanya tiga jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, dan kas sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya EQUITY Volume 4 Issue 3 (2018)
2.	Rudini, Nurhayati, dan Afriyanto (2016)	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Langkitin di Desa Langkitin	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi yang dilakukan Penggolongan transaksi pada BUMDes Langkitin belum sesuai dengan SAK ETAP.	Jurnal E-Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi, Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian Vol 2, No 1 2016

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					BUMDes Langkitin Menggunakan jurnal memorial untuk peringkasan dan neraca percobaan untuk pengikhtisaran sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Langkitin menyajikan laporan keuangan hanya dalam dua jenis yaitu neraca dan laporan laba rugi sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	
3.	Kalangi, Sondakh, dan Pratiwi (2014)	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2011 dan 2012, menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan(CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK Penelitian ini menyarankan agar perusahaan menyusun	Jurnal EMBA Vol.2 No.3 (September 2014), Hal. 254-265 ISSN 2303-1174

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					Komponen laporan Keuangan lainnya dan mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK	
4.	Fadlol, Kartini, dan Kantun (2018)	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Oryza Mart Jember Periode 2017	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Oryza Mart Jember pada periode 2017 masih belum memenuhi kelengkapan menurut SAK ETAP. Oryza Mart belum menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan hanya menyusun 3 laporan keuangan yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal. Ketidaksesuaian juga terdapat di dalam Neraca, yaitu belum ada klasifikasi terpisah antara peralatan toko dan peralatan kantor, gedung dan tanah. Selain itu, Oryza Mart belum memisahkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.	Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial Volume 12 Nomor 2 (2018) DOI:10.19184/jpe.v12i2.8570 ISSN 1907-9990 E-ISSN 2548-7175
5.	Sakti (2017)	Analisis Penerapan Standar	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian pada Tria's Cake & Bakery	Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
		Akuntansi			menunjukkan bahwa laporan keuangan yang digunakan masih menggunakan single entry atau masih menggunakan pembukuan dengan menggunakan cash basis. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat banyak kesalahan dalam pencatatan keuangannya. Pengakuan pendapatan yang seharusnya dicatat dalam akun pendapatan, dicatat menjadi akun kas yang menyebabkan laporan laba ruginya mengalami kerugian. Begitu juga dalam pengakuan modalnya, Tria's Cake & Bakery belum sesuai dengan SAK ETAP.	Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)
6.	Andrian, Atmadja, and Sinarwati (2014)	Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) (Sebuah Studi Intrepetatif	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, alasan membuat pencatatan keuangan adalah untuk mempermudah pemilik	Jurnal e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 2 No: 1 (Tahun 2014)

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
		Pada Peggy Salon)			dalam memberikan bonus kepada karyawannya, 2) Faktor yang menyebabkan gagalnya SAK ETAP pada Peggy Salon karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari stakeholder yang berkepentingan dengan laporan keuangan.	
7.	Widyastuti (2017)	Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yang disebabkan kurangnya pengetahuan pengusaha terhadap tujuan, manfaat dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP. Berdasarkan hasil penelitian, perlu ada penyuluhan penerapan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP bagi para pelaku usaha sektor UMKM	Journal for Business and Entrepreneur <a href="http://www.journal.uta45jakarta.ac.id">www.journal.uta45jakarta.ac.id</a> Jurnal Online Nasional dan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Vol. 1 No. 1 July – December 2017 ISSN 2501-6682
8.	Norkamsiah, Kesuma	Penerapan Standar Akuntansi	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan	Jurnal AKUNTABEL: Jurnal

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
	(2016)	Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Penyusunan Laporan Keuangan			bahwa laporan keuangan yang disusun oleh CV Aba Komputer belum menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP) dalam hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber manusia yang dimiliki.	Ekonomi dan keuangan Volume 13, (2), <a href="http://journal.feb.unmul.ac.id">http://journal.feb.unmul.ac.id</a> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia. ISSN print: 0216-7743 ISSN online: 2528-1135 (2016)
9.	Singal, Ribka Agustin Pinatik (2015)	Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi Dan Neraca Berdasarkan Sak Etap Pada Pt.Karunia Multiguna Abadi	Variabel independen: -Evaluasi penyusunan laporan laba rugi -Evaluasi penyusunan neraca Variabel dependen : SAK ETAP		Hasil penelitian berdasarkan penyajian laporan neraca dan laba rugi yang dibuat oleh PT. Karunia Multiguna Abadi pada bulan September tahun 2015 masih belum sesuai dengan kaidah SAK ETAP dan masih ada pengklasifikasian pos akun yang belum disajikan, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Sebaiknya manajemen perusahaan mempekerjakan karyawan yang terampil dalam bidang akuntansi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya	Jurnal Jurnal EMBA 395 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 395-403 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi ISSN 2303-1174

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					Penggunaan laporan keuangan	
10.	Kurniawansyah (2016)	Penerapan Pencatatan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Umkm Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	Pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan	SAK ETAP	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM belum membutuhkan informasi akuntansi dan menyatakan bahwa sulit untuk melakukan pencatatan akuntansi dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Kebutuhan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi dianggap hanya membuang waktu dan biaya. Responden mengakui pentingnya pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dalam mendukung keberlanjutan perusahaan, tetapi belum menerapkan sesuai SAK ETAP karena berbagai kendala. UMKM di Desa Gembongsari belum menerapkan pencatatan akuntansi sesuai standar baku dan belum menggunakan informasi akuntansi secara optimal.	Jurnal Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal Universitas Airlangga Surabaya ISBN 978-602-60569-2-4 (2016)
11.	Ponomban, Yohanes Saerang,	Analisis Penerapan Laporan Keuangan	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Dari hasil penelusuran dan analisis terhadap CV. Bahu Bahtera	Jurnal EMBA Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 622-630



No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
	David P.E. Wangkar (2016)	Berdasarkan Sak-Etap Pada Cv. Bahu Bahtera Indah Manado			Indah Manado mengenai penyajian Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di peroleh kesimpulan bahwa dalam penyajian laporan keuangan CV. Bahu Bahtera Indah Manado masih banyak perbedaan atau ketidaksesuaian dengan SAK-ETAP. Bahkan ada juga laporan-laporan keuangan yang tidak di terbitkan oleh CV. Bahu Bahtera Indah Manado padahal perlu di terbitkan menurut SAK-ETAP yaitu penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya ,dan juga uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.	ISSN 2303-1174
12.	Sinaga, Rani Cenni. Sondakh , Jullie J. Alexander (2016)	Analisis Penerapan SAK ETAP Atas Persediaan Pada Pt Kawanua Dasa Pratama	SAK ETAP	Laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan SAK ETAP atas Persediaan pada PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Cabang Tikala Baru belum	Jurnal EMBA Vol.4 No.4September 2016, Hal. 1173-1182 ANALISIS ISSN 2303-1174

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
		(Fresh Mart) Cabang Tikala Baru			sepenuhnya diterapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang SAK ETAP. Sebaiknya pihak administrasi perusahaan menampilkan kartu persediaan secara keseluruhan, melakukan penilaian persediaan, pencatatan atas barang yang masuk dan keluar dari gudang, mengungkapkan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode sehingga pengguna informasi keuangan dapat mudah mengerti serta meminimalisir kecurangan dan kerugian di PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart) Cabang Tikala Baru.	
13.	(Yuliza 2016)	Analisis Penerapan Sak-Etap Pada Koperasi Di Universitas Pasir Pengaraian	SAK ETAP		Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwasanya koperasi UPP belum memahami akuntansi koperasi yang seharusnya diterapkan oleh koperasi. Laporan keuangan koperasi UPP disusun secara bersama-sama oleh ketua, sekretaris,	Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 5 No. 2 Juli 2016

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					dan bendahara pada koperasi tersebut.	
14.	Apriyanto, Juhanda. Khairani, Siti. Pratiwi (2015)	Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Kasus Pada Pengusaha Budidaya Lele Mariani)	SAK ETAP	Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Budi Daya Lele Mariani tidak melakukan pencatatan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku pada SAK ETAP. Kendala yang ditemui memberikan penyimpangan dalam mengembangkan usaha Budi Daya Lele ini dan penyelesaian kendala yang ada membutuhkan pihak eksternal yang lebih memahami mengenai pencatatan akuntansi pada sistem laporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP. Sehingga, penerapan dilakukan memberikan bentuk pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP pada Budi Daya Lele Mariani serta pihak eksternal dapat memberikan kontribusi mengenai seluruh sistem pencatatan keuangan yang	Jurnal Jurusan Akuntansi Keuangan, STIE MDP, Palembang (2015)

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					sesuai prosedur akuntansi kepada pelaku UMKM.	

#### 2.4.2 Kerangka Pemikiran

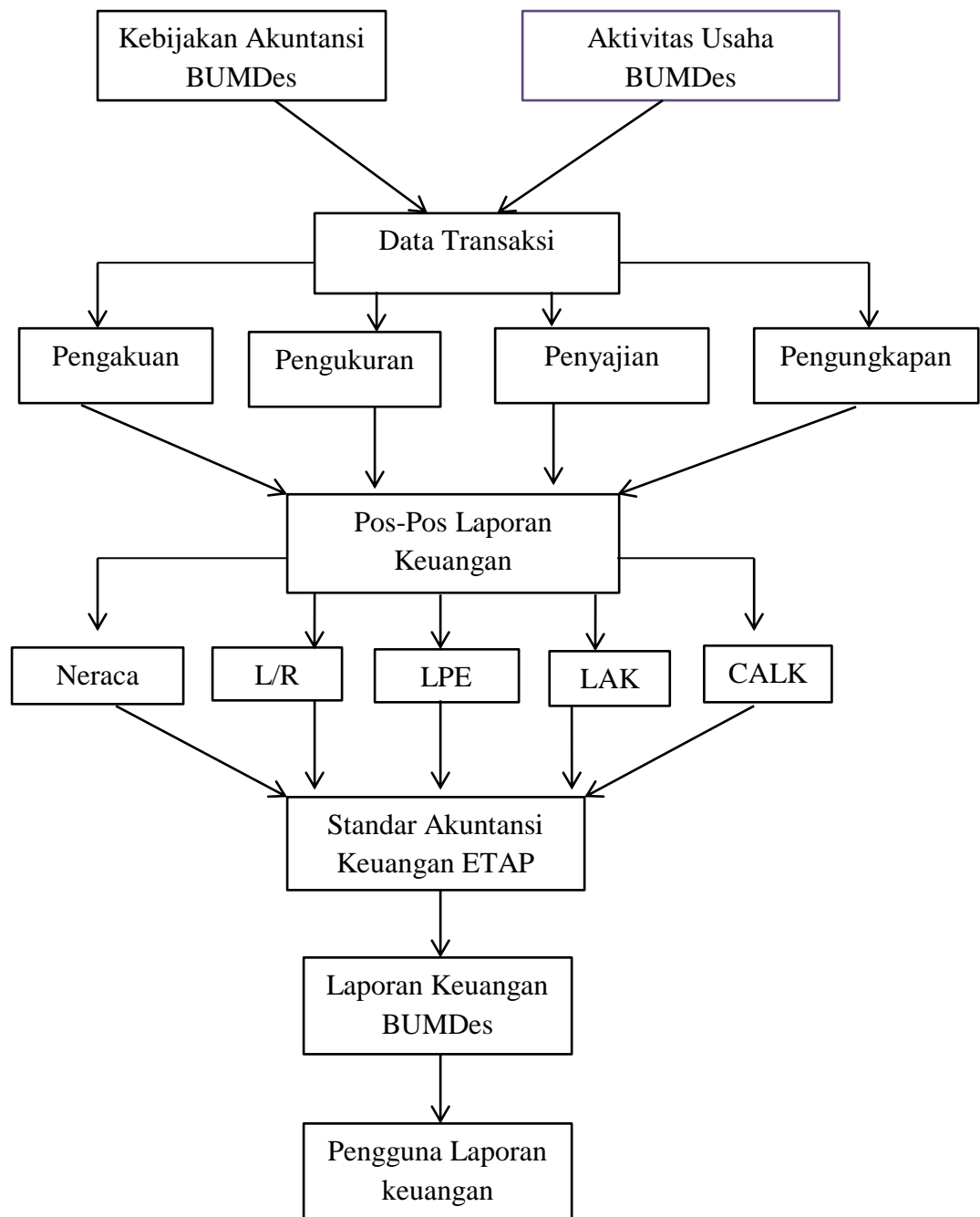
Pada umumnya laporan keuangan BUMDes disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, tetapi pada kenyataannya masih banyak BUMDes yang menyusun laporan keuangannya tanpa berdasarkan standar yang berlaku, itu karena kurangnya pengetahuan dari pengelola BUMDes dan juga tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah maupun pusat tentang Standar Akuntansi yang seperti apa untuk menyusun laporan keuangan BUMDes.

BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan, artinya dalam hal penyusunan laporan keuangannya maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu SAK ETAP.

SAK ETAP sendiri bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Laporan keuangan lengkap menurut SAK ETAP meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. tetapi BUMDes biasanya tidak menyajikan secara lengkap laporan keuangannya dikarenakan kurangnya pengetahuan cara menyajikan laporan keuangan tersebut.

Dari uraian tersebut, maka peneliti telah membuat kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir dan Prastowo, 2011).

Nana Syaodih Sukmadinata (2011) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2017). Dengan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam proses penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dimana menggunakan metode analisis yang akan dinyatakan berdasarkan dengan keadaan atau fakta yang terjadi.

Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Organization, sehingga datanya mengenai atau berasal dari respons suatu organisasi tertentu.

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibodas yang berada di Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi. Pemilihan Lokasi ini dengan pertimbangan karena lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam proses pengambilan data, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya kesalahan pencatatan atau kesalahpahaman dengan masyarakat setempat.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut :

#### 1. Data primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang/masyarakat) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Pada penelitian ini peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan misalnya, melalui wawancara langsung dengan pengurus BUMDes Cibodas Desa Cibodas Kecamatan Cibitung.

#### 2. Data sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data (dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pada jurnal terdahulu dan beberapa buku sebagai referensi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan yang didapatkan dari pengurus BUMDes Cibodas.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran
Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)	1. Neraca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset</li> <li>• Kewajiban</li> <li>• Ekuitas</li> </ul>
	2. Laporan Laba Rugi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan</li> <li>• Beban pokok penjualan</li> <li>• Beban operasi</li> <li>• Laba usaha</li> </ul>
	3. Laporan Perubahan Ekuitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldo Awal</li> <li>• Laba Usaha</li> <li>• Saldo Akhir</li> </ul>

Variabel	Indikator	Ukuran
	4. Laporan Arus Kas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas operasi (metode tidak langsung)</li> <li>• Aktivitas investasi</li> <li>• Aktivitas pendanaan</li> </ul>
	5. Catatan Atas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar penyusunan laporan keuangan</li> <li>• Kebijakan akuntansi</li> <li>• Memberikan Informasi tambahan</li> <li>• Pengungkapan informasi</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh Penulis (2019)

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sesuai dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer metode pengumpulan datanya adalah metode survei, metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis (Indriantoro dan Supomo, 2014). Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Ada 2 teknik pengumpulan data dalam metode survei, yaitu teknik wawancara dan teknik kuisisioner. Dan peneliti hanya menggunakan teknik wawancara.

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik kuisisioner akan kurang memperoleh tanggapan responden (Indriantoro dan Supomo, 2014).

Sedangkan metode pengumpulan data untuk data Sekunder dilakukan dengan cara secara manual seperti teknik dokumentasi.

#### 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang berupa faktur, jurnal, surat-surat bukti transaksi, gambaran suatu peristiwa atau biografi. Menurut Sugiyono (2016) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti memperoleh data dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dokumen BUMDes



untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun gunanya dokumentasi adalah untuk mengetahui informasi tentang data-datanya yang dipakai sebagai bahan untuk peneliti.

### **3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, atas dasar tersebut, langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalisis penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan laporan Keuangan BUMDes. Pengumpulan data ini bersumber dari data yang ada di BUMDes Cibodas.
2. Menganalisis Neraca BUMDes Cibodas apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum.
3. Menganalisis Laporan Laba Rugi BUMDes Cibodas apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum.
4. Menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas BUMDes Cibodas apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum.
5. Menganalisis Laporan Arus Kas BUMDes Cibodas apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum.
6. Menganalisis Catatan Atas Laporan Keuangan BUMDes Cibodas apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum.
7. Menarik hasil, kesimpulan dan saran terhadap sistem penyusunan laporan keuangan yang benar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum BUMDes Cibodas**

##### **4.1.1 Profil BUMDes Cibodas**

BUMDes Cibodas ini terletak di Desa Cibodas Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi. BUMDes ini didirikan Pada tanggal 1 Januari 2019, dengan didirikannya BUMDes Cibodas tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga Desa Cibodas, karena bukan lagi program “topdown” atau paket program dari pemerintah daerah atau pusat, melainkan pembangunan desa yang digerakkan oleh kekuatan warga.

Pada awal berdiri BUMDes Cibodas tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha melainkan menggali beberapa potensi yang berada di Desa Cibodas. Penggalan potensi ini memakan waktu kurang lebih satu bulan, dikarenakan letak geografis wilayah desa cibodas yang terdiri dari tiga kedesunan dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta sebagian besar juga merantau ke kota-kota besar. Penggalan potensi ini dilakukan antara bulan pertengahan bulan Januari 2019. Setelah didapat beberapa data, kemudian dibuatlah peta konsep dimasing-masing tempat yang tentunya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai pendukung kegiatan dalam menentukan unit usaha.

BUMDes Cibodas Ini bergerak dibidang perdagangan, dimana BUMDes ini menjual beberapa kebutuhan masyarakat yaitu toko kelontongan, dan BUMDes ini juga bertindak sebagai grosir bagi toko kecil yang membutuhkan barang dagangan, BUMDes ini pun menampung makanan ringan dan minuman hasil olahan masyarakat setempat. Untuk mempermudah permodalan dan penyediaan barang, BUMDes ini bekerja Sama dengan Persatuan Perdagangan Indonesia (PPI).

##### **Struktur Organisasi BUMDes Cibodas**

Komisaris	: Sari Rohanah (Kepala Desa)
Direktur	: Yanti
Sekretaris	: Irma Damayanti
Bendahara	: Harry Bastian
Pengawas	: Ujang Suherli

#### 4.1.2 Visi Misi dan Dasar Hukum BUMDes

Visi dari pendirian BUMDes Cibodas yaitu : “Mari Bersama Membangun Desa”.

Sedangkan Misi BUMDes Cibodas sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha yang bergerak dibidang perdagangan.
2. Pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
3. Pembangunan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.

Dasar hukum BUMDes Cibodas

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, BUMDes Cibodas berpedoman pada :

1. UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 tentang BUMDes;
2. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 87 dan 88 tentang Desa;
3. PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, khususnya BAB VIII tentang BUMDes pasal 132 terkait dengan pendirian BUMDes.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.
5. Peraturan Desa Cibodas No. 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cibodas

#### 4.1.3 Pelaksanaan Pengelolaan, Permasalahan dan Program Kerja

##### A) Pelaksanaan Pengelolaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha kegiatan BUMDes Cibodas, yaitu :

- 1) Sebelum melaksanakan pengambilan keputusan selalu berkoordinasi dengan komisaris dan anggota pengelola. Terutama dalam penjalinan kerjasama dan arah kebijakan lainnya. Hal ini untuk menjaga keterbukaan kegiatan. Selain itu, melaporkan arus kas kepada komisaris secara berkala tiap akhir bulan. Juga kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui perkembangan aset BUMDes Cibodas.
- 2) Kemandirian  
Kemandirian yang dilakukan oleh pengelola BUMDes Cibodas, dengan memperhatikan 3 prinsip kerja, yaitu :
  - a. Mempertinggi Kompetensi

Selalu berupaya menambah pengetahuan tentang ke BUMDes an agar dapat melakukan kegiatan secara maksimal. Salah satu bentuk kegiatannya adalah melakukan kegiatan mandiri, dengan cara membaca buku-buku yang

berkaitan dengan Desa dan atau sekitar permasalahan BUMDes serta browsing internet mengenai kegiatan-kegiatan BUMDes.

b. Memperbanyak Kolaborasi

Untuk dapat mengembangkan usaha, pengelola BUMDes Cibodas berusaha memperbanyak kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak dengan sistem saling menguntungkan. Selain itu, juga sebagai sarana memperluas jaringan pasar.

c. Memperkecil Kompetensi

Banyak usaha-usaha atau pendirian badan usaha disekitar BUMDes Cibodas bukan lah ancaman kelangsungan hidup lembaga. Karena pada prinsipnya semua rezeki yang mengatur Tuhan yang maha kuasa, sebab usaha tidak akan mengkhianati hasil. Untuk itu peluang bagi BUMDes Cibodas dalam menjalin kerjasama.

Prinsip pembangunan BUMDes tersebut diatas sebagai wujud sikap ke profesionalan dalam pengelolaan BUMDes Cibodas agar tidak berbenturan dengan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3) Akuntabel

Adanya BUMDes Cibodas Desa Cibodas sebagai lokomotif pengembangan perekonomian. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa selaku komisaris serta melaporkan arus kas dan atau kegiatan secara berkala merupakan wujud pertanggungjawaban pengelola terhadap pengelolaan BUMDes Cibodas.

4) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat supaya kegiatan berjalan secara maksimal serta kelangsungan usaha BUMDes berjalan secara kontinyu. Selain membuat laporan secara berkala kepada Kepala Desa atau Komisaris juga dibuatnya laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun kegiatan. Laporan ini dibuat selain sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan juga sebagai bahan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di BUMDes Cibodas.

5) Kewajaran

Pengelolaan BUMDes Cibodas dilakukan secara wajar, artinya pengelola dalam menjalankan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak dibuat-buat atau direkayasa, semua kegiatan dalam bentuk real atau nyata.

B) Permasalahan

Dalam pengelolaan BUMDes Cibodas masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dan belum tahu tentang pengelolaan yang sudah dikelola oleh pengelola BUMDes.

### C) Program Kerja

Pada tahun 2020 pengelola BUMDes Cibodas mencanangkan beberapa program kerja, diantaranya :

- a. PPOB Pajak Kendaraan
- b. Bank Sampah
- c. Sablon Baju
- d. Wisata Puncak Pantun
- e. Sewa Mobil Angkutan

#### 4.1.4 Arah Kebijakan Yang Telah Ditempuh BUMDes Cibodas

Kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh BUMDes Cibodas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu kerja sama dengan persatuan perdagangan Indonesia (PPI). Kerjasama ini dilakukan dikarenakan pada awal berdiri belum mempunyai modal. Dengan sistem kerja sama yang saling menguntungkan. BUMDes Cibodas secara perlahan mendapatkan pemasukan secara kontinyu.
2. Mengikuti BIMTEK pelatihan dan studi banding pengelolaan BUMDes.  
Kegiatan yang telah diikuti antara lain :
  - a. BIMTEK BUMDes di Pondok Asri Salabintana Sukabumi.
  - b. Studi bersama Menteri Desa di Sukabumi.
  - c. Penghargaan BUMDes aktif dan produktif di Bandung bersama Gubernur Jawa Barat.
3. Melakukan kerja sama pasar dengan beberapa sales makanan diperusahaan ternama.
4. Melakukan kegiatan sosial
5. Memberikan santunan pada lansia.
6. Memberi sumbangan untuk pembangunan masjid
7. Memberi sumbangan rutinitas keagamaan seperti Maulid Nabi
8. Memberikan bantuan untuk kegiatan sepakbola
9. Menerima kunjungan BUMDes se-Kabupaten Sukabumi dan se-Kecamatan Cibitung.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Pencatatan Laporan Keuangan BUMDes Cibodas

Laporan keuangan BUMDes merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi, BUMDes Cibodas membuat laporan keuangan ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas usaha yang BUMDes Cibodas jalankan. BUMDes Cibodas ini memberikan laporan pertanggungjawabannya ke Desa dan juga Kecamatan atas uang yang telah BUMDes Cibodas terima dari Desa untuk menjalankan BUMDes tersebut. Yang nanti hasilnya bisa digunakan untuk bahan evaluasi, apa saja yang

perlu diperbaiki dan perlu dipertahankan agar BUMDes Cibodas tetap berjalan. Tetapi dalam membuat laporan keuangan ini BUMDes Cibodas belum menetapkan standar akuntansi untuk menyusun laporan keuangannya.

BUMDes Cibodas hanya membuat laporan keuangan secara sederhana saja, laporan keuangannya hanya ada laporan laba rugi, itu juga tidak mencatat semua yang seharusnya dicatat di laporan laba rugi, dimana di laporan laba rugi BUMDes Cibodas ini hanya ada pendapatan, pengeluaran, belanja, beban listrik, beban gaji, dan laba. Untuk pendapatan sendiri BUMDes Cibodas ini hanya mencatat pendapatan tunai, sedangkan pendapatan kreditnya tidak dicatat sebagai pendapatan, dan pendapatan tersebut tidak dijelaskan apakah hasil dari penjualan tunai atau hasil pembayaran piutang. Pembayaran utang, dan pembayaran beban lain-lain dimasukkan di akun pengeluaran, dan untuk akun belanja itu khusus untuk pembelian tunai. selain laporan laba rugi BUMDes Cibodas juga melakukan pencatatan harian yang terkait dengan penjualan, pengeluaran, beban-beban, semua transaksi BUMDes dicatat setiap hari di buku catatan BUMDes.

Yang menyusun laporan keuangan BUMDes Cibodas hanya satu orang yaitu bendahara BUMDes, tidak aneh jika laporan keuangan yang dibuatnya cukup sederhana, dan bendahara BUMDes cibodas pun tidak mengetahui standar apa yang cocok untuk laporan keuangan BUMDes karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan juga tidak adanya pendampingan dan pengawasan dari pihak terkait mengenai kegiatan dalam menyusun laporan keuangan BUMDes. selain karena sibuk mengurus BUMDes Cibodas dia juga mempunyai bisnis sampingan yang telah ia jalani sejak dulu sehingga fokusnya terbagi.

Jika berpedoman pada SAK ETAP seharusnya laporan keuangan yang lengkap meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sedangkan dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas yang disajikan hanya Laporan Laba Rugi dan catatan-catatan harian baik dari pendapatan maupun pengeluaran.

#### **4.2.2 Siklus Akuntansi**

##### **1. Pembuatan Daftar Kode Akun**

Daftar kode akun akuntansi harus mencerminkan komponen-komponen yang menyusun laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Pembuatan daftar kode akun akuntansi, penulis menggunakan 4 digit sehingga memudahkan untuk menambahkan akun baru sesuai kebutuhan.

Digit Pertama Menunjukkan Klasifikasi Utama Laporan Keuangan, Yaitu:

- (1) Untuk Aset
- (2) Untuk Kewajiban

- (3) Untuk Ekuitas
- (4) Untuk Pendapatan/Penjualan
- (5) Untuk Beban Pokok Penjualan
- (6) Untuk Beban

Digit Kedua Menunjukkan Subklasifikasi:

- (11) Untuk Aset Lancar
- (12) Untuk Aset Tidak Lancar
- (21) Untuk Kewajiban Jangka Pendek
- (22) Untuk Kewajiban Jangka Panjang
- (31) Untuk Modal
- (41) Untuk Penjualan
- (51) Untuk Beban Pokok Penjualan
- (61) Untuk Beban-Beban

Digit Ketiga Menunjukkan Akun Spesifik:

- (111) Kas
- (112) Piutang Dagang
- (113) Persediaan Barang Dagang
- (114) Perlengkapan Kantor
- (115) Sewa Dibayar Di Muka
- (121) Tanah
- (122) Bangunan
- (123) Akumulasi Penyusutan Bangunan
- (124) Kendaraan
- (125) Akumulasi Penyusutan Kendaraan
- (126) Peralatan
- (127) Akumulasi Penyusutan Peralatan
- (211) Utang Dagang
- (212) Utang Dividen
- (311) Modal
- (312) Tambahan Modal Disetor
- (313) Laba Ditahan

- (314) Iktisar Laba Rugi
- (411) Penjualan
- (412) Diskon Penjualan
- (413) Retur Penjualan dan Pengurangan
- (511) Beban Pokok Penjualan
- (512) Pembelian
- (513) Diskon Pembelian
- (611) Beban Lain-Lain
- (612) Beban Perlengkapan
- (613) Beban Penyusutan
- (614) Beban Sewa
- (615) Beban Upah dan Gaji

Digit keempat menunjukkan akun subspesifik:

- (1110) Kas
- (1120) Piutang Dagang
- (1130) Persediaan Barang Dagang
- (1140) Perlengkapan Kantor
- (1150) Sewa Dibayar Di Muka
- (1210) Tanah
- (1220) Bangunan
- (1230) Akumulasi Penyusutan Bangunan
- (1240) Kendaraan
- (1250) Akumulasi Penyusutan Kendaraan
- (1260) Peralatan
- (1270) Akumulasi Penyusutan Peralatan
- (2110) Utang Dagang
- (2120) Utang Dividen
- (3110) Modal
- (3120) Tambahan Modal Disetor
- (3130) Laba Ditahan
- (3140) Iktisar Laba Rugi



- (4110) Penjualan
- (4120) Diskon Penjualan
- (4130) Retur Penjualan dan Pengurangan
- (5110) Beban Pokok Penjualan
- (5120) Pembelian
- (5130) Diskon Pembelian
- (6110) Beban Lain-Lain
- (6120) Beban Perlengkapan
- (6130) Beban Penyusutan
- (6140) Beban Sewa
- (6150) Beban Upah dan Gaji

Dengan semakin berkembang suatu perusahaan, jumlah transaksi semakin banyak. Selain itu pertumbuhannya menciptakan kebutuhan akan informasi yang terperinci untuk digunakan dalam mengelolanya. Oleh karena itu kode akun digit keempat berguna untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan memudahkan para pembaca laporan keuangan lebih memahaminya.

## 2. Transaksi

BUMDes Cibodas tidak memberikan bukti transaksi kepada penulis karena bukti transaksinya tidak ditemukan dan pada saat diwawancara oleh penulis pun mereka bilang lupa menyimpannya dimana, dan mereka berpikir tidak terlalu penting jika sudah digunakan, karena mereka mencatat penerimaan dan pengeluaran di buku catatan harian tetapi tidak merincikan penerimaan kas dan kepada siapa pengeluaran kas tersebut, karena terlalu banyak transaksi setiap harinya itu mengakibatkan kesulitan bagi pengurus BUMDes untuk mencatatnya, seharusnya pengurus BUMDes Cibodas masih menyimpan beberapa bukti transaksi seperti Kwitansi, nota, faktur, bukti kas masuk/keluar dan sebagainya. Berikut contoh pencatatan transaksi atas penerimaan dan pengeluaran kas BUMDes Cibodas sesuai dengan SAK ETAP:

Tabel 4.1  
Contoh Pencatatan Transaksi  
Selama Bulan Desember 2019

Tgl	Transaksi
4.	Pembelian barang dagangan dari suplier secara tunai sebesar Rp1.510.000
8.	Pembelian peralatan berupa laptop dan printer dengan harga Rp5.300.000 secara tunai
12.	Penambahan modal dari Gubernur sebesar Rp100.000.000

Tgl	Transaksi
16.	Pembelian barang dagangan ke PPI sebesar Rp15.000.000 secara kredit
20.	Pembayaran beban listrik selama satu bulan sebesar Rp53.000
20.	Pembayaran beban lain-lain selama satu bulan sebesar Rp485.000
26.	Pembayaran hutang dagang ke PPI sebesar Rp9.000.000
30.	Pembayaran beban gaji pegawai sebesar Rp1.500.000
30.	Total penjualan barang dagangan secara kredit sebesar Rp3.285.000
31.	Total penjualan barang dagangan secara tunai dari sebesar Rp16.720.000

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

### 3. Jurnal

Buku jurnal semua transaksi dicatat sehingga dari buku jurnal kita dapat mengetahui semua transaksi yang terjadi didalam perusahaan. Buku jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menampung penjelasan-penjelasan yang menyertai transaksi tersebut karena buku jurnal merupakan sumber pencatatan transaksi. Setelah jurnal dibuat maka langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar.

Tahap penjurnalan BUMDes Cibodas selama ini belum melakukan pencatatan atas transaksi dengan pembuatan jurnal dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Pencatatan transaksi dan kegiatan akuntansi BUMDes Cibodas menggunakan *cash basis* sehingga membuat laporan keuangannya akan mengalami kesalahan nilai nominal dari beberapa akun-akun yang ada. Dalam SAK ETAP sendiri dijelaskan bahwa metode pengakuan yang dipakai harus menggunakan *accrual basis*. Berikut rekomendasi peneliti dalam proses penjurnalan atas transaksi yang terjadi dalam BUMDes Cibodas sesuai dengan SAK ETAP:

Tabel 4.2

#### Jurnal Umum

BUMDes Cibodas 31 Des 2019

Tanggal		Keterangan	Ref	Saldo	
				Debit	Kredit
Des	4	Pembelian		Rp1.510.000	
		Kas			Rp1.510.000
Mencatat Pembelian Barang Dagangan Secara Tunai					
	8	Peralatan		Rp5.300.000	
		Kas			Rp5.300.000
Mencatat Pembelian Peralatan Secara Tunai					
	12	Kas		Rp100.000.000	
		modal			Rp100.000.000

Tanggal	Keterangan	Ref	Saldo	
			Debit	Kredit
Mencatat Penambahan Modal Dari Gubernur				
16	Pembelian		Rp15.000.000	
	Utang Dagang			Rp15.000.000
Mencatat Pembelian Barang Dagangan Secara Kredit				
20	Beban listrik		Rp53.000	
	Kas			Rp53.000
Mencatat Pembayaran Beban Listrik				
25	Beban lain-lain		Rp485.000	
	Kas			Rp485.000
Mencatat Pembayaran Beban Lain-lain				
26.	Utang Dagang		Rp9.000.000	
	Kas			Rp9.000.000
Mencatat Pembayaran Hutang Dagang Ke PPI				
30.	Beban Gaji		Rp1.500.000	
	Kas			Rp1.500.000
Mencatat Pembayaran Beban Gaji				
30.	Piutang		Rp3.285.000	
	Penjualan			Rp3.285.000
Mencatat Total Pendapatan Penjualan Secara Kredit				
31	Penjualan		Rp16.720.000	
	Kas			Rp16.720.000
Mencatat Total Pendapatan Penjualan Tunai				

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

### 3. Buku Besar

Tahap pemostingan ke buku besar, BUMDes Cibodas belum membuat buku besar, karena kurangnya pengetahuan mengenai begitu pentingnya penyusunan buku besar dalam proses akuntansi untuk sampai ke proses berikutnya. Berikut rekomendasi peneliti dalam proses posting ke buku besar BUMDes Cibodas sesuai dengan SAK ETAP:

Tabel 4.3

Buku Besar

(Disajikan dalam Ribuan Rupiah)

BUMDes Cibodas 31 Des 2019

## Nama Akun: Kas (1110)

Tgl		Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
2019						Debit	Kredit
Des	1	Saldo Awal				Rp13.384	
	4	Pembelian barang			Rp1.510	Rp11.874	
	8	Pembelian peralatan			Rp5.300	Rp6.574	
	12	Tambahan modal		Rp100.000		Rp106.574	
	20	Pembayaran listrik			Rp53	Rp106.521	
	25	Pembayaran beban lain-lain			Rp485	Rp106.036	
	26	Pembayaran Utang dagang			Rp9000	Rp97.036	
	30	Pembayaran gaji			Rp1.500	Rp95.536	
	31	Pendapatan penjualan			Rp16.720	Rp112.256	

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

## Nama Akun: Pembelian (5120)

Tgl		Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
2019						Debit	Kredit
Des	1	Saldo Awal				Rp57.683,5	
	4	Pembelian barang		Rp1.510		Rp59.193,5	
	26	Pembelian barang		Rp15.000		Rp74.193,5	
	31					Rp74.193,5	

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

## Nama Akun: Peralatan (1260)

Tgl		Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
2019						Debit	Kredit
Des	1	Saldo Awal				Rp2.915	
	8	Pembelian peralatan		Rp5.300		Rp8.215	
	31					Rp8.125	

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

Nama Akun: Piutang dagang (1120)

Tgl		Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
2019						Debit	Kredit
Des	1	Saldo Awal				Rp13.419	
	30	Penjualan barang		Rp3.285		Rp16.704	
	31					Rp16.704	

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

Nama Akun: Utang Dagang (2110)

Tgl		Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
2019						Debit	Kredit
Des	1	Saldo Awal					Rp5.937,5
	16	Pembelian barang dagangan			Rp15.000		Rp20.937,5
	26	Pembayaran Utang		Rp9000			Rp11.937,5
	31						Rp11.937,5

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

Nama Akun: Modal (3110)

Tgl		Keterangan	Ref	Debit	Kredit	Saldo	
2019						Debit	Kredit
Des	1	Saldo Awal					Rp15.000
	12	Penambahan modal			Rp100.000		Rp115.000
	31						Rp115.000

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

#### 4. Neraca Saldo

Penyusunan neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. BUMDes Cibodas belum membuat neraca saldo. Berikut rekomendasi peneliti dalam membuat neraca saldo BUMDes Cibodas sesuai dengan SAK ETAP:

Tabel 4.4

#### Neraca Saldo

BUMDes Cibodas 31 Des 2019

No. Account	Nama Akun	daftar saldo	
		debit (Rp)	kredit (Rp)
1110	kas	112.256.000	
1120	piutang dagang	16.704.000	
1130	persediaan	-	
1140	perlengkapan kantor	950.000	
1150	sewa dibayar dimuka	7.000.000	
1260	peralatan	8.215.000	
1270	akumulasi penyusutan	-	
2110	utang dagang		11.937.500
3110	modal		115.000.000
4110	penjualan		103.468.000
5120	pembelian	74.193.500	
6110	beban lain-lain	4.477.000	
6120	beban perlengkapan	-	
6130	beban penyusutan	-	
6140	beban sewa	-	
6150	beban upah dan gaji	6.610.000	
3140	iktisar laba rugi		
	Total	230.405.500	230.405.500

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

## 5. Ayat Jurnal Penyesuaian

Jika pada akhir periode akuntansi, terdapat transaksi yang belum dicatat, atau ada transaksi yang salah, atau perlu disesuaikan maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. BUMDes Cibodas belum membuat jurnal penyesuaian. Berikut rekomendasi peneliti dalam membuat ayat jurnal penyesuaian BUMDes Cibodas sesuai dengan SAK ETAP:

Tabel 4.5  
Jurnal Penyesuaian  
BUMDes Cibodas 31 Des 2019

Tanggal		Keterangan	Ref	Saldo	
2019				Debit	Kredit
Des	31	Beban sewa		Rp7.000.000	
		Sewa dibayar dimuka			Rp7.000.000
Mencatat Beban Sewa					

Tanggal		Keterangan	Ref	Saldo	
2019				Debit	Kredit
	31	Beban perlengkapan		Rp650.000	
		Perlengkapan			Rp650.000
Mencatat Beban Perlengkapan					
	31	Beban penyusutan		Rp671.333	
		Akumulasi penyusutan			Rp671.333
Mencatat Beban Penyusutan					

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

Penjelasan Mengenai Ayat Jurnal Penyesuaian :

1. Sewa ruko ke Hj. Ibu Eha pada bulan Januari 2019 sebesar Rp7000.000 untuk satu tahun sampai dengan 31 Desember 2019. Sehingga pada tanggal 31 Desember di sesuaikan, dan ayat jurnal penyesuaiannya seperti diatas.
2. Pembelian perlengkapan pada bulan januari sebesar Rp700.000 ditambah pada bulan April sebesar Rp250.000 jadi total perlengkapan sebesar Rp950.000, setelah dihitung perlengkapan pada tanggal 31 Desember 2019 tersisa senilai Rp300.000, sehingga diketahui beban perlengkapan selama satu tahun sebesar Rp650.000.
3. Pembelian peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp2.915.000 yang terdiri dari kursi, meja dan rak dagang. Sedangkan pembelian peralatan pada bulan Desember sebesar Rp5.300.000 yang terdiri dari laptop dan juga printer. Perhitungan beban penyusutannya sebagai berikut :

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Rp2.915.000}}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp583.000 per tahun}$$

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Rp5300.000}}{5 \text{ tahun}} = \text{Rp1.060.000 per thn}$$

$$= \text{Rp88.333 per bln}$$

Jadi total beban penyusutan selama tahun 2019 = Rp671.333

## 6. Neraca Lajur

BUMDes Cibodas belum membuat neraca lajur, maka berikut penulis merekomendasikan dalam membuat neraca lajur BUMDes Cibodas sesuai dengan SAK ETAP:

Tabel 4.6

### Neraca Lajur

BUMDes Cibodas 31 Desember 2019

No. Account	Nama Akun	daftar sako		penyesuaian		saldo disesuaikan		laba rugi		posisi keuangan	
		debet (Rp)	kredit (Rp)	debet (Rp)	kredit (Rp)	debet (Rp)	kredit (Rp)	debet (Rp)	kredit (Rp)	debet (Rp)	kredit (Rp)
1110	kas	112.256.000				112.256.000				112.256.000	
1120	piutang dagang	16.704.000				16.704.000				16.704.000	
1130	persediaan	-				-				-	
1140	perlengkapan kantor	950.000			650.000	300.000				300.000	
1150	sewa dibayar dimuka	7.000.000			7.000.000	-				-	
1260	peralatan	8.215.000				8.215.000				8.215.000	
1270	akumulasi penyusutan	-			671.333		671.333				671.333
2110	utang dagang		11.937.500				11.937.500				11.937.500
3110	modal		115.000.000				115.000.000				115.000.000
4110	penjualan		103.468.000				103.468.000		103.468.000		
5120	pembelian	74.193.500				74.193.500		74.193.500			
6110	beban lain-lain	4.477.000				4.477.000		4.477.000			
6120	beban perlengkapan	-		650.000		650.000		650.000			
6130	beban penyusutan	-		671.333		671.333		671.333			
6140	beban sewa	-		7.000.000		7.000.000		7.000.000			
6150	beban upah dan gaji	6.610.000				6.610.000		6.610.000			
3140	iktisar laba rugi							9.866.167			9.866.167
	Total	230.405.500	230.405.500	8.321.333	8.321.333	231.076.833	231.076.833	103.468.000	103.468.000	137.475.000	137.475.000

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

### 4.2.3 Neraca

#### A. Pengakuan Akun-Akun Pada Bumdes Cibodas Sesuai SAK ETAP

##### 1. Aset Lancar

###### a. Kas

SAK ETAP paragraf 7.1 menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Paragraf 7.2 setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Paragraf 7.16 entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.

Kas di BUMDes Cibodas merupakan sejumlah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional BUMDes, dan kas tersebut merupakan hasil dari pendapatan penjualan dan juga dari gubernur sebagai tambahan modal sebagai bentuk apresiasi atas BUMDes yang berprestasi. Transaksi yang dilakukan oleh BUMDes Cibodas dicatat dengan menggunakan pencatatan sederhana di buku catatan toko yang direkap oleh bendahara BUMDes Cibodas.



BUMDes Cibodas belum membuat neraca pada laporan keuangannya dan belum melakukan pencatatan kas pada buku catatan kas, dimana kas tersebut hanya dicatat di buku catatan BUMDes. Pengakuan kas dan setara kas menurut SAK ETAP harus diakui dalam neraca, sehingga pengakuan kas dan setara kas pada BUMDes Cibodas belum sesuai dengan SAK ETAP.

#### **b. Persediaan**

BUMDes Cibodas belum mengakui persediaan pada laporan keuangannya, karena BUMDes ini baru berdiri awal tahun 2019, dan pengurus BUMDes tidak melakukan perhitungan fisik setiap akhir bulan maupun akhir tahun terhadap barang dagangannya, pengurus BUMDes hanya melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah kadaluwarsa atau belum. Seperti yang dibilang oleh pengurus BUMDes bahwa cukup sulit untuk menghitung persediaan akhir yang ada di toko kelontongan seperti pada BUMDes Cibodas ini, karena banyaknya barang dan beragam pula barang dagangannya, ditambah lagi perhitungannya secara manual tidak ada mesin sama sekali yang bisa membantu perhitungan persediaan, dan hanya satu orang yang aktif dalam mengurus BUMDes Cibodas ini.

SAK ETAP paragraf 11.3 entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. BUMDes Cibodas sudah memenuhi nilai persediaan berdasarkan uang yang dikeluarkan untuk mendatangkan persediaan sampai masuk ke toko. Namun BUMDes Cibodas tidak membuat neraca sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP.

### **2. Aset Tetap**

Pengakuan aset tetap dari BUMDes Cibodas dengan cara mencatat semua aset tetap pada buku catatan toko, aset tetap pada SAK ETAP paragraf 15.4 diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tetap tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengakuan aset tetap yang dilakukan BUMDes Cibodas belum sesuai dengan SAK ETAP karena BUMDes Cibodas belum menyusun neraca.

### **3. Kewajiban**

Pengakuan kewajiban menurut SAK ETAP paragraf 2.35 diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Pencatatan hutang yang dilakukan BUMDes

Cibodas dengan mencatat hutang pada buku catatan toko. Sehingga Pengakuan hutang dari BUMDes Cibodas ini belum sesuai dengan SAK ETAP karena BUMDes Cibodas belum menyusun neraca.

#### 4. Ekuitas

BUMDes Cibodas mencatat modal awal di buku catatan toko dan di akhir tahun direkap oleh pengurus BUMDes untuk dipindahkan ke laporan keuangan yang akan diberikan ke Kepala Desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kinerja BUMDes selama satu tahun.

Menurut SAK ETAP paragraf 19.23 modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor, nilai nominalnya dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca. Modal BUMDes Cibodas berasal dari Pemerintah Desa dan dicatat di laporan keuangan BUMDes Cibodas tetapi tidak dicatat di neraca karena belum menyusun neraca, sehingga belum sesuai dengan SAK ETAP.

Tabel 4.7

#### Perbandingan Pengakuan

#### BUMDes Cibodas dengan ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Cibodas	Kriteria
Paragraf 7.16 entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.	BUMDes Cibodas belum membuat neraca pada laporan keuangannya dan belum melakukan pencatatan kas pada buku catatan kas, dimana kas tersebut hanya dicatat di buku catatan BUMDes.	Belum Sesuai
SAK ETAP paragraf 11.3 entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.	BUMDes Cibodas sudah memenuhi nilai persediaan berdasarkan uang yang di keluarkan untuk mendatangkan persediaan sampai masuk ke toko. Namun BUMDes Cibodas tidak membuat neraca.	Belum Sesuai
Pada SAK ETAP paragraf 15.4 tentang aset tetap. aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. pengakuan aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan.	Pengakuan aset tetap dari BUMDes Cibodas dengan cara mencatat semua aset tetap pada buku catatan toko karena belum menyusun neraca.	Belum Sesuai

SAK ETAP	BUMDes Cibodas	Kriteria
Paragraf 2.35 pengakuan kewajiban menurut SAK ETAP diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.	Pencatatan hutang yang dilakukan BUMDes Cibodas dengan mencatat hutang pada buku catatan toko	Belum Sesuai
Menurut SAK ETAP paragraf 19.23 modal dasar, modal yang ditempatkan, modal yang disetor, nilai nominalnya dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham dinyatakan dalam neraca	Modal BUMDes Cibodas berasal dari Pemerintah Desa dan dicatat di laporan keuangan BUMDes Cibodas tetapi tidak dicatat di neraca karena belum menyusun neraca	Belum Sesuai

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

## **B. Pengukuran Akun-Akun Pada BUMDes Cibodas Sesuai SAK ETAP**

### **1. Aset Lancar**

#### **a. Kas dan Setara Kas**

Proses pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kas dan setara kas dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas berdasarkan pencatatan nominal dari akun-akun yang tersedia pada laporan keuangan BUMDes Cibodas dengan dicatat sebesar harga perolehan.

Menurut SAK ETAP paragraf 2.31 dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. Biaya historis aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Sehingga pengukuran kas BUMDes Cibodas sudah sesuai dengan SAK ETAP.

#### **b. Persediaan**

BUMDes Cibodas belum mencatat akun persediaan pada laporan keuangannya, tetapi akun persediaan tersebut masih dicatat sebagai akun pembelian pada laporan laba rugi BUMDes Cibodas, dan pengukuran akun persediaan yang dilakukan berdasarkan harga perolehan pada saat pembelian barang dagangan.

Menurut SAK ETAP paragraf 11.3 menyatakan entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Paragraf 11.4 biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya

lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Pengukuran yang dilakukan oleh BUMDes Cibodas sesuai dengan yang dijelaskan oleh SAK ETAP yaitu diukur sebesar biaya perolehan.

## **2. Aset Tetap**

Pengukuran pada akun aset tetap yang dilakukan oleh BUMDes Cibodas ini dengan mencatatnya sebesar biaya perolehan, yang didalamnya termasuk biaya kirim, biaya pemasangan dan lain-lain. Paragraf 15.6 pada saat pengukuran awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Sehingga pengukuran aset tetap yang dilakukan BUMDes Cibodas sudah sesuai dengan SAK ETAP.

## **3. Kewajiban**

Menurut SAK ETAP paragraf 2.31 sudah dijelaskan bahwasanya kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

Pengukuran pada akun hutang yang dilakukan BUMDes Cibodas untuk menetapkan nilai nominalnya adalah pada akun hutang diukur berdasarkan nilai historis sebesar harga perolehan saat transaksi dilakukan. Sehingga pengukuran kewajiban yang dilakukan oleh BUMDes Cibodas sudah benar dan sesuai dengan SAK ETAP.

## **4. Ekuitas**

Menurut SAK ETAP paragraf 2.19 ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk perseroan terbatas, subklasifikasi dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas.

BUMDes Cibodas mencatat modal awal pada laporan keuangannya, tetapi tidak melakukan pengukuran terhadap modal yang sudah digunakannya dan belum diketahui berapa modal setelah dikurangi oleh semua kewajiban. Sehingga pengukuran ekuitas ini belum sesuai dengan SAK ETAP.

Tabel 4.8

Perbandingan pengukuran

BUMDes Cibodas dengan ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Cibodas	Kriteria
Menurut SAK ETAP paragraf 2.31 dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.	Pengukuran yang ditetapkan untuk mengukur kas dan setara kas dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas berdasarkan pencatatan nominal dari akun-akun yang tersedia pada laporan keuangan BUMDes Cibodas dengan dicatat sebesar harga perolehan.	Sesuai
Paragraf 11.3 menyatakan entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.	Pengukuran akun persediaan yang dilakukan berdasarkan harga perolehan pada saat pembelian barang dagangan	Sesuai
Paragraf 15.6 dijelaskan bahwa saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur berdasarkan harga perolehan	Pengukuran pada akun aset tetap yang dilakukan oleh BUMDes Cibodas ini dengan mencatatnya sebesar biaya perolehan, yang didalamnya termasuk biaya kirim, biaya pemasangan dan lain-lain.	Sesuai
Paragraf 2.31 kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.	Pada akun utang dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima.	Sesuai
Paragraf 2.19 ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca.	BUMDes Cibodas mencatat modal awal pada laporan keuangannya, tetapi tidak melakukan pengukuran terhadap modal yang sudah digunakannya dan belum diketahui berapa modal setelah dikurangi oleh semua kewajiban.	Belum Sesuai

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

### C. Penyajian Neraca Sesuai SAK ETAP

BUMDes Cibodas tidak membuat neraca, oleh karena itu tidak bisa dibandingkan apakah Neracanya sudah sesuai dengan SAK ETAP atau belum. Sebenarnya BUMDes Cibodas memiliki data yang cukup untuk menyusun neraca, tetapi semua itu tidak dilakukan karena kurangnya pengetahuan dan informasi dari pengurus BUMDes serta tidak adanya pendampingan dari pihak terkait agar pengurus BUMDes bisa menyusun neraca sesuai dengan SAK ETAP.

Neraca yang disusun oleh penulis merupakan hasil dari data yang diberikan oleh Pengurus BUMDes Cibodas yang ada di laporan keuangan BUMDes dan ditambah di buku catatan toko. Seperti akun Kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, peralatan, utang dagang, dan modal. Untuk piutang dagang di buku catatan toko ditulis sebagai akun bon, dan utang dagang BUMDes Cibodas ini terjadi karena pembelian kredit ke PPI (Persatuan Perdagangan Indonesia). Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan Neraca yang sesuai dengan SAK ETAP dengan metode *accrual basis*, yang datanya didapatkan langsung dari BUMDes Cibodas. Neraca sebagai berikut:

Tabel 4.9  
Neraca  
BUMDes Cibodas 31 Des 2019

NERACA			
31 Desember 2019			
Disajikan dalam Rupiah			
Asset		Kewajiban	
Asset Lancar		Utang Dagang	11.937.500
Kas	112.256.000		
Piutang Dagang	16.704.000		
Perlengkapan Kantor	300.000	Total Kewajiban	11.937.500
Total Asset Lancar	129.260.000		
Asset Tidak Lancar		Ekuitas	
peralatan	8.215.000	Modal	115.000.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(671.333)	Laba Ditahan	9.866.167
Total Asset Tidak Lancar	7.543.667	Total Ekuitas	124.866.167
Total Asset	136.803.667	Total Kewajiban dan Ekuitas	136.803.667

Sumber: Penulis (2020) berdasarkan SAK ETAP

#### 4.2.4 Laporan Laba Rugi

##### A. Pengakuan Akun-Akun Pada BUMDes Cibodas Sesuai SAK ETAP

###### 1. Pendapatan

Paragraf 20.8 entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi;

- a) Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli;
- b) Entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya di asosiasikan dari kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang terjual;
- c) Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
- d) Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas; dan

- e) Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

BUMDes cibodas mencatat pendapatan pada akun laba rugi, dan pendapatan BUMDes Cibodas ini dapat diukur secara andal. Dengan begitu pengakuan pendapatan BUMDes Cibodas ini sudah sesuai berdasarkan SAK ETAP.

## 2. Beban

Paragraf 2.37 pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

BUMDes Cibodas mencatat beban pada laporan laba rugi sehingga beban akan mengurangi pendapatan yang diterima. Sehingga pengakuan yang dilakukan BUMDes Cibodas sudah sesuai dengan SAK ETAP karena mengurangi pendapatan dan juga dapat diukur secara andal.

Tabel 4.10

### Perbandingan pengakuan

#### BUMDes Cibodas dengan ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Cibodas	Kriteria
Paragraf 20.8 entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi berikut terpenuhi; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal</li> <li>• Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.</li> </ul>	BUMDes cibodas mencatat pendapatan pada akun laba rugi, dan pendapatan BUMDes Cibodas ini dapat diukur secara andal	Sesuai
Paragraf 2.37 pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.	BUMDes Cibodas mencatat beban pada laporan laba rugi sehingga beban akan mengurangi pendapatan yang diterima dan beban juga dapat diukur secara andal.	Sesuai

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

## B. Pengukuran Akun-Akun BUMDes Cibodas Sesuai SAK ETAP

### 1. Pendapatan

Paragraf 20.3 entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.

Pengukuran pendapatan BUMDes Cibodas ini berdasarkan nilai wajar dari jumlah kas hasil penjualan barang dagangan, tanpa memasukan potongan volume maupun jumlah diskon penjualan. Sehingga pengukuran pendapatan BUMDes Cibodas ini sudah sesuai dengan SAK ETAP.

### 2. Beban

Pengukuran beban BUMDes Cibodas diukur dari berapa besar kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk akun beban. Dengan kata lain diukur berdasarkan nilai wajar dari pengeluaran yang dikeluarkan dari BUMDes Cibodas. Hal ini sesuai dengan definisi penyajian wajar menurut SAK ETAP yaitu penyajian yang jujur dari pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, dan beban. Beban pada BUMDes Cibodas antara lain beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban penyusutan, dan beban lain-lain. beban diakui di laporan laba rugi dan diukur berdasarkan nilai wajar.

Tabel 4.11

#### Perbandingan Pengukuran

#### BUMDes Cibodas dengan ketentuan SAK ETAP

SAK ETAP	BUMDes Cibodas	Kriteria
Paragraf 20.3 entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan potongan volume.	Pengukuran pendapatan BUMDes Cibodas ini berdasarkan nilai wajar dari jumlah kas hasil penjualan barang dagangan, tanpa memasukan potongan volume maupun jumlah diskon penjualan.	Sesuai
Penyajian wajar menurut SAK ETAP yaitu penyajian yang jujur dari pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk aset, kewajiban, dan beban. Beban diakui di laporan laba rugi dan diukur berdasarkan nilai wajar.	Pengukuran beban BUMDes Cibodas adalah diukur dari berapa besar kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk akun beban. Dengan kata lain diukur berdasarkan nilai wajar dari pengeluaran yang dikeluarkan dari BUMDes Cibodas	Sesuai

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2020)

## C. Penyajian Laporan Laba Rugi Sesuai SAK ETAP

BUMDes Cibodas membuat Laporan Laba Rugi tetapi didalamnya hanya terdapat pendapatan, pengeluaran, belanja, beban listrik, beban upah. Jika diuraikan laporan laba rugi BUMDes Cibodas seperti ini:



Laporan laba rugi		
Pendapatan		x
Pengeluaran	x	
Belanja	x	
Beban listrik	x	
Beban upah	<u>x</u>	<u>xx</u>
Laba usaha		<u>xxx</u>

Gambar 4.1

#### Laporan Laba Rugi BUMDes Cibodas

Dari sisi pendapatan BUMDes Cibodas ini hanya mencatat pendapatan berupa kas saja tetapi piutang tidak dicatat sebagai pendapatan, pengeluaran pun didalamnya hanya mencatat pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, dan beban-beban berupa sumbangan. Sedangkan belanja hanya mencatat pembelian secara tunai kepada suplier. Oleh karena itu Laporan Laba Rugi BUMDes ini belum sesuai dengan SAK ETAP baik dari susunannya maupun pencatatan akun yang seharusnya dicatat di akun yang semestinya.

BUMDes Cibodas juga tidak mencatat beban penyusutan yang seharusnya dicatat sebagai pengurang pendapatan dan untuk mengetahui beban penyusutan tiap tahun yang nantinya di neraca dicatat sebagai akumulasi penyusutan yaitu hasil penjumlahan beban penyusutan tiap tahun, dan BUMDes Cibodas juga tidak mencatat beban perlengkapan sebagai pengurang akun perlengkapan, dan dengan adanya beban perlengkapan BUMDes bisa mengetahui beban perlengkapan yang telah digunakan selama satu tahun oleh karena itu perlengkapan yang disajikan di neraca sebagai sisa perlengkapan yang bisa digunakan untuk periode berikutnya dan beban sewa pun belum dicatat pada laporan laba rugi.

Dan peneliti merekomendasikan Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK ETAP sebagai berikut :

Tabel 4.12

#### Laporan Laba Rugi

BUMDes Cibodas 31 Des 2019

Laporan Laba Rugi			
31 Desember 2019			
Penjualan			103.468.000
Harga Pokok Penjualan :			
Persediaan Awal		-	
Pembelian		74.193.500	
Persediaan Akhir		-	
Beban Pokok Penjualan			74.193.500
Laba Kotor			29.274.500
Beban Operasi :			
Beban Lain-Lain		4.477.000	
Beban Perlengkapan		650.000	
Beban Penyusutan		671.333	
Beban Sewa		7.000.000	
Beban Gaji/Upah		6.610.000	
Total Beban			19.408.333
Laba Usaha			9.866.167

Sumber: Penulis (2020) berdasarkan SAK ETAP

#### 4.2.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Informasi Yang Disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a. Laba atau rugi untuk periode;
- b. Pendapatan dan beban diakui langsung dalam ekuitas;
- c. Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui;
- d. Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
  1. Laba atau rugi;
  2. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
  3. Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan

kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

Pada BUMDes Cibodas tidak ada penyusunan laporan perubahan ekuitas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai fungsi dari laporan perubahan ekuitas itu sendiri dan kurang mengerti bagaimana membuat laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, Peneliti akan merekomendasikan laporan perubahan ekuitas berdasarkan SAK ETAP yang berlaku :

Tabel 4.13

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
31 Desember 2019  
Disajikan dalam Rupiah

Keterangan	Modal	laba ditahan	Ekuitas
saldo awal	15.000.000	-	15.000.000
perubahan			
tambahan setoran modal	100.000.000		100.000.000
laba usaha		9.866.167	9.866.167
saldo akhir	115.000.000	9.866.167	124.866.167

Sumber: Penulis (2020) berdasarkan SAK ETAP

#### 4.2.6 Laporan Arus Kas

SAK ETAP paragraf 7.1 mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atau kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Paragraf 7.17 entitas mengungkapkan bersama dengan pendapat manajemen, jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas. Hal ini karena adanya pembatasan lalu lintas devisa atau pembatasan hukum.

SAK ETAP menganjurkan laporan arus kas dibuat dengan metode tidak langsung. Dikarenakan BUMDes Cibodas tidak membuat Laporan Arus Kas, maka penulis merekomendasikan BUMDes Cibodas untuk membuat Laporan Arus Kas berdasarkan SAK ETAP sebagai berikut:

Tabel 4.14

Laporan Arus Kas

BUMDes Cibodas 31 Des 2019

Laporan Arus Kas		
Metode Tidak Langsung		
31 Desember 2019		
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Bersih		9.866.167
Penyesuaian Untuk :		
Beban Penyusutan	671.333	
Kenaikan Perlengkapan	(300.000)	
Kenaikan Utang	11.937.500	
Kenaikan Piutang	(16.704.000)	(4.395.167)
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi		5.471.000
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian Peralatan	(8.215.000)	
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		(8.215.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penambahan Modal	100.000.000	
Kas Bersih dari yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		100.000.000
Kenaikan Bersih dalam Kas dan Setara Kas		97.256.000
Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode		15.000.000
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode		112.256.000

Sumber: Penulis (2020) berdasarkan SAK ETAP

#### 4.2.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Paragraf 8.2 Catatan atas laporan keuangan harus harus:

- Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
- Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan
- Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Paragraf 8.3 Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Paragraf 8.4 Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP
- Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan
- Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian pos pos berikut.

d. Pengungkapan lain.

Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. Kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BUMDes Cibodas belum melakukan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan entitasnya, maka peneliti merekomendasikan kepada BUMDes Cibodas untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP sebagai berikut:

1. Gambaran Umum

a. Pendirian BUMDes

BUMDes Cibodas didirikan di Desa Cibodas kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi pada tanggal 1 Januari 2019.

b. Keanggotaan

Anggota BUMDes Cibodas berasal dari penduduk Desa Cibodas.

2. Ikhtisar Kebijakan akuntansi

a. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK ETAP

Laporan keuangan BUMDes yang disusun oleh penulis bahwa laporan keuangan tahun 2019 disajikan dan sesuai dengan SAK ETAP.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus dan CALK. Laporan keuangan disusun berdasarkan *accrual basis* sehingga pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi.

c. Kas

Kas mencakup kas yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sehingga bisa digunakan ketika perusahaan membutuhkannya.

d. Persediaan

Pencatatan persediaan barang dagangan menggunakan sistem periodik, karena transaksinya banyak tapi nilainya kecil. BUMDes Cibodas ini belum mempunyai persediaan awal karena mulai aktif bulan januari 2019, dan persediaan akhir juga tidak bisa dihitung karena pengurus BUMDesnya pun sendiri kesulitan untuk menghitungnya, sehingga diganti sama akun pembelian di laporan laba rugi.

e. Aset Tetap Berwujud

Aset tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dicatat berdasarkan prinsip harga perolehan dan disusutkan dengan metode garis lurus.

f. Pendapatan dan beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima. Beban dicatat pada saat terjadinya transaksi.

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan modal yang digunakan oleh pemilik untuk membangun entitas. Pembangunan BUMDes Cibodas berdasarkan modal yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah desa dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Modal awal BUMDes ini sebesar Rp15.000.000 tetapi pada awal bulan desember ada tambahan modal dari Gubernur Jawa Barat sebesar Rp100.000.000.

#### **4.2.8 Kendala yang Dihadapi BUMDes Cibodas Dalam Penerapan SAK ETAP**

Penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes Cibodas belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan sulitnya penerapan SAK ETAP tersebut. Dari penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis terdapat beberapa hal yang menghambat penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes Cibodas

1. Belum adanya pendampingan yang intensif terkait penerapan SAK ETAP oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan BUMDes Cibodas.
3. Rendahnya pemahaman pengurus BUMDes Cibodas terhadap SAK ETAP.
4. Kurangnya sosialisasi terkait laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP oleh Ikatan Akuntansi Indonesia selaku pencetus pedoman standar ini.

#### **4.2.9 Pemakai/Pengguna Laporan Keuangan BUMDes**

##### **1. Penyampaian Laporan Keuangan BUMDes**

Setiap akhir tahun tentunya pengelola BUMDes wajib melaporkan secara rinci dan jelas laporan keuangan kepada Pemerintah Desa atau investor. Oleh karena itu BUMDes Cibodas juga harus melaporkan laporan keuangannya. BUMDes Cibodas melaporkan laporan keuangannya ke Desa dan Kecamatan pada tanggal 10 Januari 2020, laporan keuangan tersebut sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas modal yang ditanamkan atau diberikan kepada BUMDes dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Provinsi.

Sehingga dengan adanya laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban ini dapat digunakan untuk melihat aktivitas usaha dan transaksi yang dilakukan oleh BUMDes. Dengan begitu dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa ataupun Pemerintah Provinsi, dan para pemakai atau pengguna laporan keuangan dapat melihatnya dan juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Adapun laporan keuangan yang disusun oleh Penulis baru selesai pada tanggal 27 maret 2020 dan dilaporkan atau diberikan kepada pengurus BUMDes pada tanggal 02 April 2020. Laporan keuangan yang disusun oleh penulis dapat digunakan sebagai referensi bagi BUMDes dalam menyusun laporan keuangan tahun berikutnya, dan juga dapat digunakan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pihak internal BUMDes dan pihak eksternal BUMDes.

## **2. Manfaat Laporan Keuangan BUMDes Bagi Pengguna**

Pengguna/Pemakai Laporan Keuangan BUMDes Cibodas

- a. Pemerintah Desa Cibodas
- b. Kecamatan Cibitung
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibodas
- d. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- e. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
- f. Pengurus/Pengelola Bumdes
- g. Pemasok/*Supplier* (Persatuan Perdagangan Indonesia)
- h. Masyarakat
  - Investor BUMDes Cibodas
  1. Pemerintah Desa Cibodas
  2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

### **A. Manfaat Bagi Pengurus atau Pengelola BUMDes**

- a. Memberikan Informasi Tentang Kondisi Keuangan dan Kinerja BUMDes
 

Pengelola BUMDes Cibodas dapat melihat aktivitas usaha atau operasional BUMDes, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Dan itu bisa diketahui melalui laporan keuangan yang telah disusun oleh Penulis, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK.
- b. Dasar Pembuatan Keputusan
 

Laporan keuangan BUMDes Cibodas termasuk laporan arus kas yang telah disusun akan mempermudah pihak pengelola BUMDes mengambil tindakan dan menyusun perencanaan yang akan ditetapkan sebagai sebuah keputusan untuk kelanjutan BUMDes. Keputusan pengelola BUMDes sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan BUMDes yang berhubungan dengan kemungkinan adanya tambahan pemasukan berupa laba yang sudah ditargetkan oleh BUMDes Cibodas.
- c. Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kepada Pihak Eksternal
 

Laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dapat digunakan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pihak diluar pengelola BUMDes baik pemerintah desa maupun yang lainnya. Pihak eksternal pasti ingin melihat perkembangan BUMDes melalui laporan keuangan yang telah

disusun, yaitu tentang kondisi keuangan BUMDes secara nyata sehingga pembuatan laporan keuangan harus memiliki tujuan yang jelas.

#### B. Manfaat Bagi Investor

Investor disini yaitu Pemerintah Desa Cibodas dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai penanam modal pada BUMDes Cibodas, Pemerintah Desa dan Provinsi pasti selalu ingin tahu apakah modal yang mereka berikan telah digunakan secara tepat. Dengan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan SAK ETAP, investor akan merasa yakin terhadap bisnis yang dijalankan oleh BUMDes. Dengan begitu investor tidak akan merasa keberatan untuk menanamkan modalnya ke BUMDes, sehingga BUMDes dapat lebih mudah mengembangkan bisnis dengan modal tambahan dari investor tersebut. Laporan keuangan yang baik adalah bentuk kepercayaan terhadap para investor yang sudah berinvestasi pada BUMDes.

#### C. Manfaat Bagi Pemasok Atau *Supplier*

Pemasok atau *supplier* disini adalah Persatuan Perdagangan Indonesia (PPI), yang telah bekerja sama dengan BUMDes Cibodas.. Pemasok juga berhak mengetahui laporan keuangan BUMDes, karena BUMDes Cibodas ini pada awal berdirinya sudah melakukan kerja sama untuk pengiriman barang dari PPI, dan juga pembelian barangnya secara kredit. Oleh karena itu PPI sangat membutuhkan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut. PPI bisa mengambil keputusan apakah BUMDes Cibodas memiliki kemampuan membayar tagihan sesuai nominal yang tertera atau tidak. Jika BUMDes dinilai tidak mampu, maka pemasok akan menolak kerja sama dengan BUMDes Cibodas.

#### D. Manfaat Bagi Masyarakat

Bisa menjadikan laporan keuangan BUMDes Cibodas sebagai bahan masukan kepada BUMDes. Sebagai upaya dalam masalah sosial dan lingkungan seperti, seperti pengangguran. Masyarakat juga membutuhkan informasi dari laporan keuangan untuk digunakan sebagai bahan analisa, penelitian, dan tujuan tertentu.

### Penjelasan Tentang Laporan Keuangan Bumdes Cibodas

#### 1. Neraca

BUMDes Cibodas ini memiliki total aset Rp136.803.667, dimana aset tersebut ada dua yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar sebesar Rp129.260.000, dimana jumlah ini terdiri dari kas Rp112.256.000, Piutang dagang Rp16.704.000 dan perlengkapan kantor Rp300.000. Sedangkan untuk aset tidak lancarnya sebesar Rp7.543.667 yang didalamnya terdapat peralatan kantor sebesar Rp8.215.000 dan akumulasi penyusutan



sebesar Rp671.333 sebagai pengurang dari aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan ini hasil dari penyusutan peralatan.

Untuk utang dagang BUMDes Cibodas memiliki utang kepada PPI sebagai *supplier* sebesar Rp11.937.500 yang harus dibayar rutin minimal dua bulan sekali. Sedangkan ekuitas berjumlah Rp124.866.167 didalamnya ada modal sebesar Rp115.000.000, dengan rincian Rp15.000.000 modal dari Pemerintah Desa dan Rp100.000.000 modal dari Pemerintah Provinsi dan Rp9.866.167 laba ditahan, laba ditahan tersebut hasil dari laba bersih yang ditahan untuk lebih memajukan BUMDes Cibodas.

Jika dilihat dari neraca, kekayaan BUMDes Cibodas ini cukup baik bagi BUMDes yang baru berdiri, dimana jumlah kekayaannya lumayan besar dan utangnya pun kecil. Sehingga BUMDes ini kedepannya bisa berjalan baik dan terus berkembang karena memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, membayar utang, dan pembelian barang dagangan.

## 2. Laporan Laba Rugi

BUMDes Cibodas memiliki laba bersih Rp9.866.167, meskipun jumlah penjualannya cukup besar yaitu sebesar Rp103.468.000 tetapi pembelian barang dagangannya pun besar juga, yaitu sebesar Rp74.193.500. Sehingga laba brutonya sebesar Rp29.274.500 dikurangi lagi sama beban yang lumayan besar juga yaitu Rp19.408.333 sehingga labanya lumayan kecil jika melihat nilai penjualan yang cukup besar. Dengan BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan toko grosir, wajar jika labanya kecil tetapi penjualannya besar, karena dalam usaha toko ini mengambil margin keuntungannya kecil. Dengan adanya laba yang diterima BUMDes Cibodas meskipun jumlahnya kecil, BUMDes ini masih bisa mendapatkan laba yang lebih besar ditahun berikutnya. Dengan mencari supplier yang harga barangnya lebih murah dan juga menekan beban supaya lebih efisien. Sehingga bisa mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar.

## 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Modal awal BUMDes Cibodas Rp15.000.000 lalu ada tambahan modal disetor Rp100.000.000 sehingga total modalnya sebesar Rp115.000.000. Karena BUMDes Cibodas memperoleh laba bersih sebesar Rp9.866.167, sehingga menambah ekuitas menjadi Rp124.866.167. Sehingga kalau dari sisi laporan perubahan ekuitas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Cibodas memiliki ekuitas yang sehat, karena ekuitasnya naik, dan kenaikan ekuitas yang bagus adalah kenaikan ekuitas yang disumbang dari laba ditahan.

## 4. Laporan Arus Kas

Arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp5.471.000 dan bernilai positif, itu artinya BUMDes Cibodas mempunyai pendapatan yang lebih besar dibandingkan beban, dan hal ini bagus karena menunjukkan bahwa BUMDes Cibodas mampu menghasilkan kas.

Arus kas dari aktivitas investasi bernilai negatif yaitu sebesar (Rp8.215.000), artinya arus kas atau uang keluar lebih banyak daripada pemasukannya. Hal ini dikarenakan BUMDes Cibodas membeli peralatan aset tetap, sehingga menyebabkan arus kas investasi menjadi negatif.

Arus kas dari aktivitas pendanaan bernilai positif yaitu sebesar Rp100.000.000, artinya bahwa BUMDes menerima uang tunai, dan uang tersebut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga meningkatkan modal dan juga asetnya.

Secara keseluruhan bahwa kenaikan bersih dalam kas dan setara kas setelah aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, masih bernilai positif sebesar Rp97.256.000, ditambah dengan kas dan setara kas awal periode Rp15.000.000, jadi kas dan setara kas pada akhir periode sebesar Rp112.256.000, sehingga untuk laporan arus kas BUMDes Cibodas tersebut dapat dikatakan bagus, karena arus kasnya positif.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan SAK ETAP dalam laporan keuangan BUMDes Cibodas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes Cibodas terdiri atas Laporan Laba Rugi, dan catatan-catatan transaksi toko. Hal ini masih belum sesuai dengan SAK ETAP. Di dalam SAK ETAP disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dan pengakuan, pengukuran, penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dengan benar. dan BUMDes Cibodas masih menggunakan metode pencatatan *Cash basis* sedangkan menurut SAK ETAP harus menggunakan *accrual basis*.
2. Laporan laba rugi telah disusun oleh BUMDes Cibodas namun penyajiannya belum sesuai dengan SAK ETAP karena masih banyak akun yang belum dimasukkan di laporan laba rugi seperti beban penyusutan, beban sewa, dan beban perlengkapan, begitu juga dengan akun pendapatan, dimana pendapatan hanya dicatat pada saat menerima kas.
3. Laporan yang telah disusun kembali oleh penulis mengikuti SAK ETAP dari mulai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran dalam upaya pembenahan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes Cibodas:

##### **A. Bagi BUMDes**

1. BUMDes harus membuat catatan keuangan sesuai dengan SAK ETAP sehingga dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada para *stakeholder* yang membutuhkan.
2. Dalam pembahasan sudah disediakan rekomendasi laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP, sehingga rekomendasi bisa diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan selanjutnya.
3. BUMDes sebaiknya mempekerjakan karyawan di bidang akuntansi agar dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan membuat sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini.

##### **B. Bagi Peneliti Selanjutnya**

1. Dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan penelitian ini sehingga penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih sempurna.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan objek berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga dapat merekomendasikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP pada BUMDes yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Lilya, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Ni Kadek Sinarwati. (2014). “Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis Sak Etap Pada Usaha Mikro Kecil Menengah ( Umkm ) ( Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon ) Jurusan Akuntansi Program S1.” 1.
- Apryanto, Juhanda. Khairani, Siti. dan Pratiwi, Raisa. (2015). “Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Sak Etap Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) (Studi Kasus Pada Pengusaha Budidaya Lele Mariani) Juhanda.”
- Fadlol, M. Ainul, Titin Kartini, dan Sri Kantun. (2018). “Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Oryza Mart Jember Pefile:///C:/Users/Davide/Desktop/Jurnal Kp/Bab 2, Siklus Akuntansi.Pdfriode 2017.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial* 12(2): 270–76.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Integrated And Comprehensive*. Jakarta: Penerbit Pt Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Penerbit Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI
- Indriantoro, N. And Supomo, B. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta. 146-147.
- Jayanti, Dwi, dan Nurul, Qomari. (2018). “Analisis Penerapan Sak Etap Pada Badan Usaha Milik Desa ( Bumdesa ) ‘ Surya Sejahtera ’ Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.” 4: 47–62..
- Kalangi, Lintje, Jullie Sondakh, And Ade Pratiwi. (2014). “Analisis Penerapan Sak Etap Pada Penyajian Laporan Keuangan Pt. Nichindo Manado Suisan.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2(3): 254–65.
- Kurniawansyah, Deddy. (2016). “Penerapan Pencatatan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Umkm Desa Gembongsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.” *Dinamika Global : Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal* Isbn: 832–41.

- Murhadi, Werner, R. (2015). Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi Dan Valuasi Saham. Jakarta: Salemba Empat
- Norkamsiah, Kesuma, Setiawaty. (2016). “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Penyusunan Laporan Keuangan.” 13(2): 151–63. <http://journal.feb.unmul.ac.id>.
- Oksa, B. (2019). Apa Kabar BUMDes Di Kabupaten Sukabumi ? Lebih Dari 30 Persen Belum Maju. SukabumiUpdate.com. Tersedia di: <https://amp.SukabumiUpdate.com/detail/desaku/berita-dinas/62500-apa-kabar-BUMDes-di-kabupaten-sukabumi-lebih-dari-30-persen-belum-maju>. (Diakses 8 Januari 2020)
- Ponomban, Yohanes. C. Saerang, David P.E. Wangkar, Anneke. (2016). “Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak-Etap Pada Cv . Bahu Bahtera Indah Manado Analysis Of The Implementation Of Financial Statements Based On The Sak-Etap Cv . Bahu Bahtera Indah Manado Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Perusahaan.” 4(3): 622–30.
- Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2007). Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Rudini, Nurhayati, And Afriyanto. (2016). “Analisis Penerapan Sak Etap Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Langkitin Di Desa Langkitin.” 2(1): 1–6. <https://media.neliti.com/media/publications/109374-Id-Analisis-Penerapan-Sak-Etap-Pada-Badan-U.Pdf>.
- Sakti. (2017). “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh).” *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53(9): 1689–99.
- Samryn, L. (2015). Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, P.33
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cv.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 (2014). Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 (2014). Tentang Pemerintahan Daerah

- Widyastuti, Pristiana. (2017). "Pencatatan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bidang Jasa." 1(1): 50–63.
- Yuliza, Arma. Afrijal. (2016). "Analisis Penerapan Sak-Etap pada Koperasi di Universitas Pasir Pengaraian." 5(2): 97–102.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riki Adi Saputra  
Alamat : Kp. Cibadak Rt/Rw 009/001, Kabupaten Sukabumi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sukabumi, 12 Mei 1997  
Umur : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan :  
• SD : SDN 2 CIDAHU  
• SMP : MTS CIDAHU  
• SMA : SMAN 1 SURADE  
• Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

Bogor, Desember 2020

Peneliti

(Riki Adi Saputra)



**LAMPIRAN**

## Lampiran 1

## Catatan Transaksi dan Aktivitas BUMDes Cibodas

catatan bulan januari	
penerimaan modal awal dari PEMDES	15.000.000
sewa ruko ke ibu Hj Eha	7.000.000
pembelian peralatan dan rak dagang	2.915.000
membeli perlengkapan	700.000
sisa uang	4.385.000

Catatan bulan maret				
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon
1	127.500			52.500 (L) irpan
2	179.500			
3	179.500			120.000 (L) Budi
4	125.000			
5	88.000			
6	109.500	60.000	(Bl)	
7	278.500	100.000	(s)	98.000 oyen
8	128.500			
9	88.000			100.000 Pk Redi
10	160.000	50.000	(s)	
11	71.000			
12	155.000	50.000	(b)	
13	92.000			
14	202.000			100.000 (L) Trisma
15	70.000	200.000	(roko)	
16	72.000			
17	124.000			
18	100.000			
19	102.000	45.000	(listrik)	
20	112.000			
21	104.500			
22	89.000			
23	139.000			
24	70.500	2.000.000	(utang)	
25	66.500			
26	36.500			
27	35.000			
28	80.500			
29	67.500	400.000	(gaji)	
30	103.500			
31	106.500			
jumlah	3.463.000	2.905.000		198.000

Catatan bulan April					
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon	
1	61.000	28.000	(Bl)		
2	139.000	100.000	(Bl)		
3	49.500			15.000	Irpan
4	291.000				
5	84.500				
6	114.000	40.000	(s)		
7	125.500				
8	220.500	10.000	(s)		
9	72.500	40.000	(perl)		
10	80.000				
11	42.500	60.000	(Bl)	6.500	Pk. Redi
12	88.600				
13	146.900				
14	152.500				
15	56.000				
16	318.500				
17	93.000				
18	785.000				
19	192.000	47.000	(listrik)		
20	86.500				
21	253.000			165.000	Usep
22	243.500	210.000	(perl)		
23	97.000				
24	157.000	2.571.000	(utang)		
25	425.500				
26	115.000	300.000	(Roko)		
27	254.500				
28	181.500	50.000	(B)		
29	337.000	400.000	(gaji)		
30	100.000				
jumlah	5.363.000	3.856.000		186.500	

Catatan bulan Mei					
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon	
1	276.500	50.000	kresek		
2	110.000				
3	430.000	510.000	(utang)	190.000	Usep
4	773.000				
5	571.500	1.390.000	(utang)		
6	120.000			50.000	(L) Risma
7	254.000				
8	98.000	70.000	(Bl)		
9	64.500	200.000	(Bl)		
10	325.000			70.000	(L) Oyen
11	62.500				
12	60.500				
13	68.000	1.500.000	(Es Cream)	172.000	Gani
14	550.000				
15	755.000	310.000	(gaji)		
16	311.500				
17	362.500	802.000	(utang)		
18	278.000			82.500	(L) Pk. Redi
19	246.500	300.000	(Roko)		
20	559.000	130.000	(listrik)		
21	227.500				
22	278.000	100.000	(bensin)		
23	263.000				
24	74.000				
25	269.000			82.000	(L) Usep
26	116.500				
27	365.500			135.000	Manah
28	336.500				
29	102.500	400.000	(gaji)		
30	151.000			96.000	Marwan
31	228.000				
jumlah	8.687.500	5.762.000		593.000	

Catatan bulan Juni				
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon
1	1.277.000			42.000 ivi
2	215.000			12.000 maman
3	302.000	200.000	(Roko)	30.000 ncon
4	260.500			38.000 badru
5	311.000			
6	375.000	1.814.000	(Es Cream)	22.000 A. Iik
7	139.000			
8	189.500	6.650.000	(Belanja)	55.000 Rani
9	341.000			49.000 mamah
10	529.000			92.000 Rudi
11	546.500			12.000 M Dasep
12	389.000			
13	153.000	50.000	(Bl)	
14	712.000			23.000 alvin
15	382.500	70.000	(Biaya Tab)	550.000 caeng
16	419.000			
17	860.000			300.000 rudi
18	382.000			
19	383.000	155.000	(Listrik)	59.000 heri
20	165.000	100.000	(Bensin)	
21	1.074.000			28.000 topa
22	264.000	2.382.000	(utang)	
23	134.000			70.000 hendi
24	198.500			
25	533.000			100.000 Bidin
26	1.095.000			
27	334.000			194.000 Nanang
28	565.500			
29	1.459.500	750.000	(gaji)	31.000 Rani
30	389.500			
jumlah	14.378.000	12.171.000		1.707.000

Catatan bulan Juli					
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon	
1	622.000				
2	239.500				
3	205.000			460.000	A Iik
4	364.500	1.440.500	(Es Cream)		
5	335.000				
6	283.500			325.500	Oyen
7	105.500	60.000	(bensin)		
8	195.000				
9	413.000			50.000	Randi
10	378.500	4.418.000	(belanja)		
11	143.000			500.000	Jana
12	354.500				
13	203.500				
14	186.000				
15	500.000	70.000	(biaya tab)	195.000	Manah
16	282.500				
17	236.000				
18	500.000	265.000	(menjamu tamu)		
19	126.500	103.000	(Listrik)		
20	275.500			300.000	Daud
21	336.500				
22	112.000				
23	360.000				
24	246.500			84.500	Abas
25	198.500			130.000	Alu
26	256.000				
27	206.000				
28	775.000			225.000	Irpan
29	205.000			74.000	Rani
30	247.500	550.000	(gaji)		
31	167.500			45.000	Aji
jumlah	9.059.500	6.906.500		2.389.000	

Catatan bulan Agustus					
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon	
1	105.000				
2	647.000	519.500	(Es Cream)		
3	243.000				
4	145.000	2.458.000	(belanja)		
5	500.000				
6	235.000			300.000	Indra
7	102.000				
8	145.000				
9	249.500				
10	130.000				
11	178.000				
12	103.000				
13	102.000	70.000	(kuota)		
14	131.000				
15	182.000				
16	110.000			80.000	Abo
17	255.000				
18	176.500			20.000	Alvin
19	888.500	103.000	(Listrik)		
20	218.000				
21	115.500				
22	358.000				
23	140.000	2.613.000	(utang)		
24	132.000				
25	137.500				
26	234.500				
27	173.000				
28	151.500				
29	170.500				
30	103.500	400.000	(gaji)		
31	116.000				
jumlah	6.677.500	6.163.500		400.000	

Catatan bulan September					
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon	
1	291.000			38.000	maman
2	424.000	959.500	(Es Cream)	20.000	samsu
3	393.500			38.000	hena
4	361.500			58.000	lukman
5	375.000	3.807.000	(belanja)	14.000	apen
6	272.000			55.000	apit
7	286.500			32.000	jani
8	331.000			41.000	cucu
9	249.500			27.500	jobing
10	317.000			114.000	usep
11	344.000			24.000	adang
12	471.000			5.000	euis
13	370.000	75.000	(kuota)	28.500	roroh
14	333.000			179.000	Rahman
15	244.000			44.500	Budi
16	358.000	300.000	(bensin)	60.500	Faiz
17	348.000	70.000	(konsumsi)	29.500	Asab
18	249.500			94.000	wawan
19	389.000	103.000	(Listrik)	33.000	jajang
20	377.500			255.000	nano
21	346.000				
22	394.000	2.000.000	(utang)	102.000	kodir
23	318.500				
24	294.500			50.000	
25	415.500				
26	355.500			84.000	samas
27	350.000				
28	379.500				
29	434.000			125.000	parman
30	362.000	600.000	(gaji)	66.000	usup
jumlah	10.434.500	7.914.500		1.617.500	



Catatan bulan Oktober					
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon	
1	364.500			32.000	Ana
2	600.000	3.948.000	(belanja)	84.000	Umar
3	380.500			99.500	Subren
4	486.000	2.329.000	(es cream)	454.500	Firman
5	313.500			34.000	Fiki
6	221.000				
7	339.000			22.000	Reksi
8	473.500			80.500	anggi
9	220.500				
10	175.000	472.000	(transport)	36.000	opik
11	200.000				
12	198.000			417.000	Yuda
13	188.500	100.000	(kuota)	171.000	Cecep
14	202.000				
15	180.500			61.000	nudin
16	178.000			219.000	Darma
17	249.500			59.000	Huri
18	382.500	103.000	(Listrik)		
19	356.500			132.500	Refi
20	293.000			304.500	Omat
21	317.000	2.000.000	(utang)		
22	350.000			285.000	Andri
23	309.000				
24	756.000	174.000	(s)	335.000	Muksin
25	461.000			356.000	Hena
26	310.000	141.000	(Bl)		
27	428.000				
28	301.000				
29	351.000				
30	350.000	800.000	(gaji)	101.500	Surya
31	219.000				
jumlah	10.154.000	10.067.000		3.284.000	

Catatan bulan November				
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon
1	340.000			45.500 Misbah
2	212.500	718.000	(es cream)	
3	291.000			94.000 Usur
4	304.000			
5	201.000	1.072.000	(belanja)	119.000 Pardi
6	198.500			
7	311.000			299.500 Amat
8	286.000			184.000 Paul
9	217.500			
10	184.500			
11	435.500			352.000 Hardi
12	257.000			
13	334.000			230.000 Sarip
14	241.500			
15	175.000			218.500 Mamad
16	306.000			
17	280.000			
18	151.000			114.500 Jenal
19	394.000	50.000	(Listrik)	
20	225.500			268.500 Ade
21	303.500			
22	199.500	2.000.000	(utang)	341.500 Asnawi
23	213.000			
24	310.000	165.000	(s)	111.500 Ogun
25	330.500			312.500 Kuple
26	424.500			
27	373.500			
28	366.000			259.000 Ijan
29	379.500	500.000	(gaji)	
30	360.500			378.500 Sidia
jumlah	8.606.000	4.505.000		3.328.500

Catatan bulan Desember					
tgl	pendapatan	pengeluaran		bon	
1	335.000			58.000	jumron
2	250.000	1.510.000	(es cream)	119.500	jamhari
3	275.000			216.000	toto
4	322.000			145.000	Rival
5	245.000			79.000	Uceh
6	315.000			55.000	Yudi
7	310.000			167.000	Egi
8	280.000	5.300.000	(laptop)		
9	300.000			305.500	Hedi
10	275.000			174.000	Panji
11	210.000				
12	222.000			158.000	Adhi
13	311.000	485.000	(transport)		
14	296.000			250.000	Emis
15	263.000				
16	361.500	53.000	(Listrik)	249.000	Marwan
17	302.500				
18	271.500			130.000	Sahrul
19	356.000			125.000	Fadil
20	238.000			45.000	Agus
21	389.000			128.000	tedi
22	205.500			218.500	Aldi
23	159.500			66.000	Hilman
24	379.000			54.000	Ajud
25	347.500			245.000	Ohan
26	385.000				
27	396.000			179.000	Marta
28	307.500				
29	458.000	1.500.000	(gaji)	118.500	Angga
30	418.500				
31	200.000				
jumlah	9.384.000	8.848.000		3.285.000	

Catatan tambahan		
12 des		Tambahan modal dari gubernur sebesar 100.000.000
16 Des		pembelian barang dagangan secara kredit ke PPI sebesar 15.000.000
26 Des		Pembayaran hutang dagang sebesar 9.000.000

Lampiran 2  
Laporan Laba Rugi BUMDes Cibodas yang Disusun Pengurus BUMDes Setiap  
Bulan

pendapatan bulan maret		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		3.463.000
pengeluaran		(2.260.000)
belanja		(200.000)
beban listrik		(45.000)
beban gaji		(400.000)
Laba usaha		558.000

pendapatan bulan April		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		5.363.000
pengeluaran		(3.109.000)
belanja		(300.000)
beban listrik		(47.000)
beban gaji		(400.000)
laba usaha		1.507.000

pendapatan bulan Mei		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		8.687.500
pengeluaran		(3.072.000)
belanja		(1.850.000)
beban listrik		(130.000)
beban gaji		(710.000)
laba usaha		2.925.500

pendapatan bulan Juni		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		14.378.000
pengeluaran		(2.602.000)
belanja		(8.664.000)
beban listrik		(155.000)
beban gaji		(750.000)
laba usaha		2.207.000

pendapatan bulan Juli		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		9.059.500
pengeluaran		(395.000)
belanja		(5.858.500)
beban listrik		(103.000)
beban gaji		(550.000)
laba usaha		2.153.000

pendapatan bulan Agustus		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		6.677.500
pengeluaran		(2.683.000)
belanja		(2.977.500)
beban listrik		(103.000)
beban gaji		(400.000)
laba usaha		514.000

pendapatan bulan September		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		10.434.500
pengeluaran		(2.445.000)
belanja		(4.766.500)
beban listrik		(103.000)
beban gaji		(600.000)
laba usaha		2.520.000

pendapatan bulan Oktober		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		10.154.000
pengeluaran		(2.887.000)
belanja		(6.277.000)
beban listrik		(103.000)
beban gaji		(800.000)
laba usaha		87.000

pendapatan bulan November		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		8.606.000
pengeluaran		(2.165.000)
belanja		(1.790.000)
beban listrik		(50.000)
beban gaji		(500.000)
laba usaha		4.101.000

pendapatan bulan Desember		
BUMDes Cibodas		
pendapatan		9.384.000
pengeluaran		(5.785.000)
belanja		(1.510.000)
beban listrik		(53.000)
beban gaji		(1.500.000)
laba usaha		536.000